

Laporan Praktek Kerja

**Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah (PAD)**



Disusun oleh :

DIAH NASTITI

314011027

**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2017**

Laporan Praktek Kerja

**Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus
dari Program Studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Teknologi Yogyakarta

Disusun oleh :

DIAH NASTITI

314011027

**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing penyusunan Laporan Praktek Kerja Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta, menyatakan membaca dan telah menyatakan bahwa laporan berjudul:

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Yang ditulis oleh:

NAMA : DIAH NASTITI


NO. MAHASISWA : 3140111027

Telah layak untuk disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir pada Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta

Mengetahui,
Kaprosdi D3 Akuntansi

Yogyakarta, 15 Agustus 2017
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Suyanto, MM., Ak.


Pulasna Putarta, SE., M.Si., Ak., CA.

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR**

Dengan Judul:

**“Evaluasi Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul”**

Oleh:

Nama : SHANIA RIZKY ANGGRIANI
NIM : 3140111065

Telah dipresentasikan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2017
Dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta

Dengan susunan tim penguji:

Bahagia Tarigan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA. : 

Drs. Taufik bin Abad, MM., Ak., CA., CTA. : 

Mengetahui,
Kaprodi D3 Akuntansi

Drs. Suyanto, MM., Ak.
NIK. 100987010

MOTTO

*"Sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah"
(QS·Al-Imron : 154)*

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"
(QS· Alam Nasyrah :6-8)*

"Keep Dreaming, Keep Believing and Let's Doing"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:

- ♣ *Allah SWT yang selalu melimpahkan karunianya bagi hamba-Mu ini.*
- ♣ *Bapak Suyono dan Ibu Mistirah, terimakasih untuk selalu sabar mendidik dan mendukungku, terimakasih atas limpahan doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga.*
- ♣ *Simbah dan adikku yang selalu memberikan nasihat, motivasi dan menyemangatiku dalam keadaan apapun.*
- ♣ *Keluarga besarku, terimakasih atas segala pengalaman yang kalian berikan, semoga menjadi motivasi agar selalu kuat dalam menghadapi masa depan.*
- ♣ *Dosen, staff karyawan dan petinggi UTY yang sudah memberikan pendidikan terbaik dan memberiku pengalaman berharga selama kuliah.*
- ♣ *Girls Squad (Agin Saputri, Aulia Rachmani Casanah, Ika Nur Setyaningsih, Lupita Nourma Sari, Mega Rantika Purtri, Mita Wulandari, Noviana Eka Indrasari, Nur Istianah, Oktin Nur Hayati dan Shania Angraini), terimakasih untuk tiga tahun ini, selalu menemani dalam suka maupun duka, selalu tersenyum dan tertawa bersama, semoga tali persaudaraan kita tidak akan pernah terputus.*
- ♣ *Segenap karyawan SAMSAT Kabupaten Kulon Progo, terimakasih atas pengalaman selama hampir 2 bulan, maaf kalau selama magang ini ada tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.*
- ♣ *Sahabat-sahabat D3 Akuntansi 2014, terimakasih sudah berjuang bersama selama tiga tahun ini, semoga apa yang menjadi cita-cita kalian semua dapat tercapai.*
- ♣ *Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-per satu, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan demi tersusunnya laporan tugas akhir.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rakhmat dan Hidayah NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)" dengan lancar dan tepat waktu.

Laporan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk dinyatakan lulus dari Program Studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta.

Penulis mampu menyelesaikan tulisan ini atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: Kaprodi Diploma 3 Akuntansi Drs. Suyanto, M.M., Ak. yang telah memberikan ijin untuk melakukan praktek kerja ke instansi maupun perusahaan. Pulasna Putarta, SE., M.Si, Ak., CA. selaku dosen pembimbing. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberi semua kebutuhan untuk menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara, sahabat dan teman-teman serta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, semoga amal kebaikan semuanya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Laporan tugas akhir ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila proses penulisan hasil akhir laporan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenaan.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2017
Penulis,

DIAH NASTITI
3140111027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PEGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	4
C. Manfaat Penulisan.....	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Deskripsi Perusahaan.....	9
B. Sejarah Perusahaan	10
C. Visi dan Misi.....	14
D. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	15
E. Struktur Organisasi	16
F. Uraian Tugas dan Fungsi.....	17
BAB III PEMBAHASAN	
A. Aktivitas Magang.....	26
B. Landasan Teori	27
1. Dasar-dasar Perpajakan.....	27
a. Definisi Pajak	27
b. Fungsi Pajak	29
c. Pengelompokkan Pajak	30
d. Sistem Pemungutan Pajak	30
e. Asas Pengenaan Pajak	33
2. Pajak Daerah	34
a. Definisi Pajak Daerah	34
b. Jenis-jenis Pajak Daerah	35
3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
b. Dasar Hukum.....	36

c. Objek Pajak	37
d. Subjek Pajak	37
e. Wajib Pajak	37
f. Dasar Pengenaan	38
g. Tarif Pajak	40
4. Pendapatan Asli Daerah.....	41
D. Langkah-langkah Evaluasi	43
1. Menentukan Jenis dan Sumber Data yang akan Dievaluasi.....	43
2. Pengumpulan Data	43
3. Pengolahan dan Analisis Data.....	44
4. Pelaporan Hasil Evaluasi.....	45
E. Analisis Data.....	47
1. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	47
2. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo.	49
F. Pembahasan.....	51
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	51
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	53
G. Hambatan dan Upaya dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di KPPD Kabupaten Kulon Progo.....	55
1. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di KPPD Kabupaten Kulon Progo.....	55
2. Upaya yang Dilakukan KPPD Kabupaten Kulon Progo untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	57
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	63
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah	43
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah.....	44
Tabel 3.3	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2016	45
Tabel 3.4	Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD di KPPD Kulon Progo Tahun 2012-2016.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi KPPD Kabupaten Kulon Progo	17
Gambar 3.1	Kontribusi Realisasi PKB terhadap PAD KPPD Kulon Progo Tahun 2012-2016.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Magang
- Lampiran 2. Tracer Study Pengguna Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta
- Lampiran 3. Presensi Kegiatan Magang
- Lampiran 4. Target/Realisasi PKB dan BBNKB Tahun 2008 s/d 2015 dan Prediksi Tahun 2017 s/d 2018 dengan Denda dan Tanpa Denda KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo
- Lampiran 5. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 s/d 2016

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek kerja lapangan merupakan syarat wajib bagi mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta untuk menyusun Tugas Akhir. Praktek Kerja lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga ketika lulus mahasiswa telah terlatih di dunia kerja. Melalui praktek kerja inilah mahasiswa dapat melakukan pengamatan, menerapkan beberapa teori yang telah dipelajari di dalam kelas, serta dapat memperoleh beberapa informasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan tugas akhir. Dalam hal ini, penulis melakukan praktek kerja di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Kulon Progo (Samsat Kulon Progo). KPPD Kabupaten Kulon Progo merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. KPPD Kulon Progo mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dalam pelaksanaan tugasnya KPPD Kulon Progo dibantu 2 instansi yaitu Direktorat Kepolisian Lalu Lintas

dan PT. Jasa Raharja yang berkoordinasi di dalam satu kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap Kulon Progo.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan atas pembayaran tersebut, hasilnya digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu budgetair.

Pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Di KPPD Kabupaten Kulon Progo, Pajak Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.

Menurut Siahaan (2010:142) pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting. Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh KPPD Kulon Progo bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pajak daerah

terdapat salah satu pajak yang ikut memberikan peran cukup penting dalam menyumbang pendapatan asli daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dipilihnya pajak kendaraan bermotor sebagai objek pembahasan karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai prospek cukup baik sebagai sumber penerimaan daerah. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang memiliki dan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor dalam melakukan segala aktivitasnya. Meskipun banyak yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dinilai masih cukup rendah. Hal ini menyebabkan masih banyak potensi pajak kendaraan bermotor yang belum terealisasi sehingga menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah kurang optimal. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam

mematuhi kewajiban membayar pajaknya sehingga kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam menunjang PAD di KPPD Kulon Progo akan semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran yang dikemukakan diatas, maka penulis akan mengevaluasi hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan menuangkannya dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul “Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di KPPD Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan PAD yang disumbangkan oleh KPPD Kulon Progo kepada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan KPPD Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

C. Manfaat Penulisan

Manfaat dari hasil penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah KPPD Kulon Progo
 - a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dimanfaatkan oleh KPPD Kulon Progo untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dalam menentukan atau menetapkan suatu kebijakan yang lebih baik sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
 - b. Hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan evaluasi mengenai kontribusi yang diperoleh dari pemungutan pajak kendaraan bermotor dan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD Kulon Progo.
2. Bagi Penulis
 - a. Penulisan ini berguna sebagai bahan terapan dan pengembangan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah.
 - b. Penulisan ini bermanfaat dalam menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai instansi pemerintah dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta.

3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Laporan
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami tentang perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor.
 - b. Bagi pembaca, diharapkan laporan ini dapat menambah wawasan baru.
4. Bagi Universitas Teknologi Yogyakarta
 - a. Sebagai evaluasi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dimasa yang akan datang.
 - b. Memperoleh gambaran nyata tentang instansi pemerintah.
 - c. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang terampil .
 - d. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi kepustakaan yang dapat digunakan pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang perpajakan pada instansi pemerintah khususnya tentang pajak kendaraan bermotor.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini secara umum dibahas tentang alasan mengapa dilakukan praktik kerja di suatu perusahaan atau instansi. Pendahuuan terbagi dalam beberapa sub bagian, yaitu:

a. Latar belakang

Latar belakang menguraikan mengenai alasan mengapa dilakukan praktik kerja di suatu perusahaan atau instansi dan penjelasan mengenai pentingnya penulisan laporan sesuai judul.

b. Tujuan

Tujuan yang akan diuraikan dalam bab ini adalah tujuan penulisan laporan praktik kerja yang dilakukan pada suatu perusahaan atau instansi.

c. Manfaat

Manfaat yang akan diuraikan dalam bab ini adalah manfaat yang diperoleh selama melaksanakan praktik kerja.

d. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan diuraikan mengenai urutan bab dalam laporan beserta penjelasan singkatnya.

2. Bab II Gambaran Umum Instansi

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala hal yang terkait dengan perusahaan (instansi) tempat melaksanakan praktik kerja. Secara umum yang harus diuraikan dalam bab ini yaitu:

- a. Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo.
- b. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo.
- c. Visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo.

- d. Kedudukan tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo.
- e. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo.
- f. Uraian tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo.

3. Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab III ini akan diuraikan mengenai pemahaman mahasiswa terhadap aktivitasnya selama melakukan praktek kerja di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo, termasuk didalamnya yaitu tentang data dan temuan yang diperoleh selama melakukan praktek kerja serta pembahasannya.

4. Bab IV Penutup

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari proses pembahasan yang diperoleh selama praktek kerja dan saran yang diharapkan dapat membantu dan berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo.

BAB II

GAMBARAN PERUSAHAAN

A. Deskripsi Perusahaan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam sebuah Kantor Bersama Samsat. Samsat Kulon Progo merupakan sistem kerjasama terpadu antara Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset/Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo (KPPD) dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kulon Progo.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat. KPPD Kulon Progo bertugas sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam pelaksanaan tugasnya KPPD Kulon Progo dibantu oleh Direktorat Kepolisian Lalu Lintas dan PT. Jasa Raharja yang berkoordinasi di dalam satu kantor

bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kulon Progo.

B. Sejarah Perusahaan

Pada masa penjajahan Belanda, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipungut oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, pada awal kemerdekaan pun jumlah kendaraan masih sangat sedikit sehingga belum merupakan sumber pendapatan yang potensial pada saat itu. Namun, pada perkembangannya dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, beberapa jenis pajak termasuk Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah tingkat I/Provinsi, melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1969.

Pada saat itu wajib pajak apabila akan melakukan perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena harus mendatangi tiga kantor instansi terkait. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) harus mendatangi kantor Jasa Raharja, mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Sedangkan, setiap instansi belum terintegrasi.

Atas dasar kondisi tersebut muncul gagasan untuk melakukan kerjasama dengan menyatukan pelayanan dalam satu atap. Sehingga pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 dengan tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan Kantor Bersama Samsat di Polda Metro Jaya.

Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1988 berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep Samsat diberlakukan di seluruh Indonesia dengan Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi yang saling bekerjasama. Meski demikian masing-masing instansi mempersiapkan sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan di Samsat.

Tahun 1988 sampai dengan tahun 1993 berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung menjadi satu Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS

Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

Hingga pada tahun 1999 sampai dengan saat ini berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi *cash register* sebagai tanda bukti pembayaran.

Di Yogyakarta sendiri, pada awal tahun 1978 didirikan sebuah Kantor Samsat darurat yang berlokasi di Gondolayu Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1982 kantor Samsat dipindahkan di Jalan Tentara Pelajar nomor 15 Yogyakarta.

Namun karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin hari semakin meningkat maka dianggap perlu membentuk kantor Samsat di daerah Kabupaten/kota. Sebagai upaya untuk mempermudah Pelayanan kepada Wajib Pajak maka dibentuklah Kantor Samsat di Kabupaten dan Kota Pada:

1. Tanggal 13 Januari 1982 didirikan Kantor Samsat di Kota Yogyakarta diresmikan oleh Mendagri Amir Machmud;

2. Tanggal 18 Agustus 1986 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten Bantul;
3. Tanggal 26 April 1984 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten Kulon Progo;
4. Tanggal 28 April 1984 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten Gunung Kidul;
5. Tanggal 18 Maret 1987 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten Sleman.

Samsat Kulon Progo merupakan salah satu unit Samsat kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang dibentuknya Samsat Kulon Progo adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana lalu lintas kecelakaan Jasa Raharja. Tujuan dibentuknya Samsat Kulon Progo adalah untuk memberikan pelayanan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Jasa Raharja.

Samsat Kulon Progo merupakan sistem kerjasama terpadu antara Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo (KPPD) dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kulon Progo.

KPPD Kulon Progo merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY yang bertugas bertanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

C. Visi dan Misi

Berikut ini merupakan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo:

1. Visi KPPD Kulon Progo yaitu:

Terwujudnya Pelayanan Secara Cepat, Tepat dan Aman Demi Kepuasan Masyarakat

2. Misi KPPD Kulon Progo yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan untuk wajib pajak.
- b. Meningkatkan kinerja yang profesional bagi pegawai.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- d. Meningkatkan kualitas legalitas dengan dokumentasi yang baik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang bertugas sebagai pemungut pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, maka KPPD/Samsat selalu berupaya mengedepankan pelayanan prima sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam berbagai inovasi pengembangan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

KPPD di Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

KPPD Kulon Progo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Kulon Progo.
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air

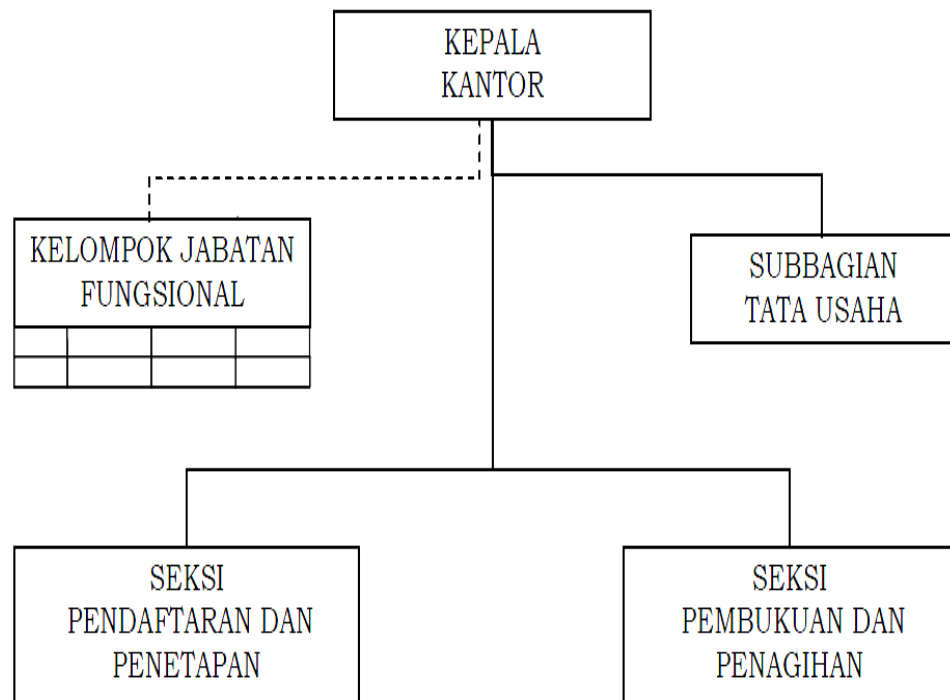
Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Pelaksanaan ketatausahaan.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program KPPD di Kabupaten Kulon Progo.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk untuk menentukan posisi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian. Berdasarkan struktur organisasi maka dapat ditentukan penjabaran tugas pokok dan fungsi, serta tata cara kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo. Bagan struktur organisasi KPPD Kulon Progo sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 Tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:



Sumber : Pergub DIY Nomor 102 tahun 2015

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)
Kabupaten Kulon Progo

F. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kulon Progo, tugas dan fungsi dari masing-masing bagian antara lain:

1. Kepala KPPD

Tugas:

Pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kota Yogyakarta.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Kulonprogo;
- b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. Pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- f. Pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program KPPD di Kabupaten Kulonprogo; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas:

- a. Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepustakaan;
- b. Penyusunan program dan laporan kinerja.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Kulonprogo;
- c. Pengelolaan kearsipan;
- d. Pengelolaan keuangan;
- e. Pengelolaan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan kerumahtanggaan;
- g. Pelaksanaan kehumasan;
- h. Pengelolaan barang;

- i. Pengelolaan kepustakaan;
- j. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program KPPD di Kabupaten Kulonprogo;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan

Tugas:

Melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

- KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. Penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - f. Pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembukuan dan Penagihan

Tugas:

Melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),

Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. Pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. Pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. Pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- g. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. Pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

Untuk Kelompok Jabatan Fungsional memiliki beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- b. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. Sehingga untuk fungsi Jabatan Fungsional tergantung pada bidang keahlian masing-masing.

6. Tata Kerja

Berikut ini merupakan tata cara kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo:

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- e. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- f. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Aktivitas Magang

Sebelum menulis laporan tugas akhir, penulis melaksanakan praktik kerja di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Kulon Progo selama 30 hari kerja yang dimulai tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 3 April 2017. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Kulon Progo memiliki 6 hari kerja dari hari Senin s/d Kamis dengan jam kerja pukul 07.30 s/d 14.00 WIB, hari Jumat dari pukul 07.00 s/d 12.00 WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.00 s/d 13.00 WIB. Saat melaksanakan praktik kerja di KPPD Kulon Progo penulis ditempatkan pada 2 bagian secara bergantian, yaitu di Bagian Pendaftaran dan Penetapan serta Bagian Pembukuan dan Penagihan.

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh penulis selama melaksanakan praktik kerja pada Bagian Pendaftaran dan Penetapan adalah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat surat keterangan fiskal mutasi kendaraan bermotor.
2. Melayani Wajib Pajak yang melakukan pengesahan Surat Keterangan Tanda Naik Kendaraan Bermotor (STNK).
3. Mencari data denda Wajib Pajak kendaraan bermotor tahun 2015.
4. Menginput data BN-1 (kendaraan baru) dan BN-II (kendaraan bekas) ke sistem online SIARDI (Sistem Arsip Digital).

5. Memeriksa kelengkapan dokumen BN-II untuk pengarsipan secara manual.
6. Mengarsip dokumen kendaraan bermotor secara manual sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
7. Membantu melaksanakan penyelenggaraan pembekalan PKB dan BBNKB kepada Aparatur Desa.

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh penulis selama melaksanakan praktik kerja pada Bagian Pembukuan dan Penagihan adalah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menginput data Wajib Pajak yang belum melakukan daftar ulang.
2. Memeriksa data Wajib Pajak yang belum melakukan daftar ulang.

B. Landasan Teori

1. Dasar-dasar Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. P.J.A Andriani menyatakan pajak (Siahaan, 2010:32) adalah iuran kepada Negara, yang dapat dipaksakan, dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat dan yang ditunjuk, dapatkan prestasi kembali yang langsung dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Siahaan (2010:35) disebutkan setidaknya ada enam ciri pajak sebagai suatu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang sertaaturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara atau ke kas daerah.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak)
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara.
- 5) Pajak diperuntukan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukan masih terdapat kelebihan atau surplus dipergunakan untuk tabungan publik (*public saving*).

- 6) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siahaan (2010:43) disebutkan empat fungsi pajak bagi pemerintah yang mengadakan pemungutan pajak, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Fungsi *budgetair* yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) adalah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* (regulasi) atau fungsi mengatur diebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

3) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi pajak sebagai alat redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah.

4) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2017:7) pajak dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria tertentu:

1) Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

b) Pajak Obyektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatifserta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung kepada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

e. Asas Pengenaan Pajak

Menurut Resmi (2017:9) ada tiga asas pemungutan pajak.

Berikut penjelasannya:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atau penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya pengertian pajak daerah adalah persis seperti pajak negara hanya perbedaannya terletak pada :

- 1) Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Pemerintah Pusat) pada umumnya penggunaannya diserahkan kepada daerah.

- 2) Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Perda DIY No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

c. Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.

Yang tidak termasuk objek pajak dalam Perda DIY No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah:

- 1) Kereta Api.
- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

d. Subjek Pajak

Pajak Daerah, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

e. Wajib Pajak

Wajib pajak meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dalam

hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

f. **Dasar Pengenaan**

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor,
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
- 2) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga pasaran

umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor - faktor :

- 1) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- 3) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
- 4) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
- 5) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
- 6) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis
- 7) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)

Bobot kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

g. Tarif pajak

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- 1) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi
- 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama. Tarif progresif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) kepemilikan kedua 2% (dua persen)
- 2) kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
- 4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

C. Langkah-langkah Evaluasi

1. Menentukan Jenis dan Sumber Data yang akan Dievaluasi

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) selama lima tahun yaitu dari tahun 2012–2016. Data ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo, data tersebut berupa:

- a. Data target anggaran penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2012-2016
- b. Data realisasi anggaran penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2012-2016
- c. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting demi keberhasilan suatu penulisan. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat demi tercapainya tujuan penulisan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode:

- a. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penulisan.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku dan data-data lain yang berkaitan dengan penulisan.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, mengolah data dan menjabarkan data. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efektifitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kulon Progo. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah

nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah. Menurut Puspitasari (2014), rumus pengukuran efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB\ ke\ n}{Target\ Penerimaan\ PKB\ ke\ n} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas penerimaan pajak daerah adalah:

Tabel 3.1
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase Efektivitas	Kategori
Hasil perbandingan > 100%	Sangat Efektif
Hasil perbandingan 90%-100%	Efektif
Hasil perbandingan 80%-90%	Cukup Efektif
Hasil perbandingan 60%-80%	Kurang Efektif
Hasil perbandingan < 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

- b. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo.

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana semakin besar hasil

perbandingan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya.

Rumus pengukuran kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB ke } n}{\text{Realisasi Penerimaan PAD ke } n} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Persentase Efektivitas	Kategori
Hasil perbandingan > 0% -10%	Sangat Kurang
Hasil perbandingan 10%-20%	Kurang
Hasil perbandingan 20%-30%	Sedang
Hasil perbandingan 30%-40%	Cukup Baik
Hasil perbandingan 40%-50%	Baik
Hasil perbandingan < 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

4. Pelaporan Hasil Evaluasi

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka hasil evaluasi akan didokumentasikan secara tertulis.

D. Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui berapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel 3.3:

Tabel 3.3
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2012-2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Tingkat Efektivitas
1	2012	21.680.000.000	23.751.555.900	109,56	Sangat Efektif
2	2013	24.891.900.000	28.042.693.950	112,66	Sangat Efektif
3	2014	29.982.750.000	32.749.185.900	109,23	Sangat Efektif
4	2015	34.730.916.000	36.889.227.100	106,21	Sangat Efektif
5	2016	38.730.916.000	42.725.290.700	110,31	Sangat Efektif
	Jumlah	150.016.482.000	164.157.953.550		
	Rata-rata	30.003.296.400	32.831.590.710	109,59	

Sumber: KPPD Kulon Progo (data diolah)

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD kabupaten Kulon Progo dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan sebesar Rp21.680.000.000 sedangkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp23.751.555.900, sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 109,56%. Tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 112,26%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp24.891.900.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp28.042.693.950.

Tahun 2014, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang besarnya Rp29.982.750.000. Sedangkan realisasinya sebesar Rp32.749.185.900. Tetapi prosentase efektivitas pada tahun ini mengalami penurunan, prosentase tahun ini sebesar 109,23%. Tahun 2015 penerimaan pajak kendaraan bermotor juga melebihi target yang besarnya Rp38.730.916.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp42.725.290.700. efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun ini kembali mengalami penurunan sebesar 3,02% dari tahun lalu, sehingga efektivitas penerimaan tahun ini sebesar 106,21%. Tahun 2016, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan sebesar Rp38.730.916.000. Sedangkan realisasinya hanya sebesar

Rp42.725.290.700 dan efektivitasnya mengalami kenaikan sebesar 4,1% dari tahun lalu, sehingga efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun ini sebesar 110,31%.

2. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo.

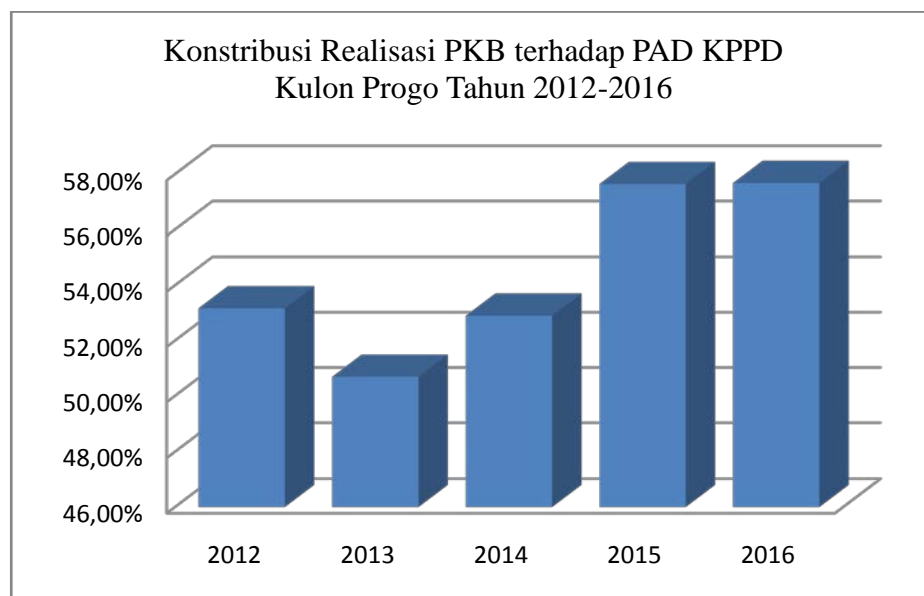
Berikut ini disajikan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo selama periode tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD KPPD Kulon Progo
Tahun 2012-2016

No	Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Presentase (%)	Tingkat Kontribusi
1	2012	23.751.555.900	44.670.330.930	53,17	Sangat Baik
2	2013	28.042.693.950	55.318.729.500	50,69	Sangat Baik
3	2014	32.749.185.900	61.909.080.800	52,90	Sangat Baik
4	2015	36.889.227.100	63.993.579.900	57,64	Sangat Baik
5	2016	42.725.290.700	74.071.591.100	57,68	Sangat Baik
	Jumlah	164.157.953.550	299.963.312.230		
	Rata-rata	32.831.590.710	59.989.908.646	54,42	

Sumber: KPPD Kulon Progo (data diolah)

Berdasarkan rangkuman tabel perhitungan kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo selama periode tahun 2012-2016 dapat diperjelas lagi dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:



Sumber: KPPD Kulon Progo (data diolah)

Gambar 3.1
Kontribusi Realisasi PKB terhadap PAD KPPD Kulon Progo
Tahun 2012-2016

Berdasarkan data tabel 3.4 dan gambar 3.1 diatas, diketahui kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (naik-turun).

Hal ini dapat dilihat dari tingkat kontribusi tahun 2012 sebesar 53,17% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp23.751.555.900 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp44.670.330.930. Namun pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 50,69% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp28.042.693.950 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp55.318.729.500. Tetapi pada tahun 2014 tingkat kontribusi mengalami peningkatan menjadi

52,90% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp32.749.185.900 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp61.909.080.800. Begitu pula pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan menjadi 57,64% dengan realisasi PKB sebesar Rp36.889.227.100 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp63.993.579.900, serta tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 57,68% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp42.725.290.700 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp74.071.591.100.

E. Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektifitas dalam hal ini adalah berkaitan dengan seberapa besar capaian yang diperoleh KPPD Kabupaten Kulon Progo dalam merealisasikan jumlah penerimaan pajak atas kendaraan bermotor yang telah ditargetkan. Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap anggaran yang telah ditetapkan oleh KPPD Kabupaten Kulon Progo sangat efektif. Dapat dilihat dari tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi 100%. Hal ini berarti bahwa target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPPD Kabupaten Kulon Progo telah tercapai.

Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi (naik-turun).

Penyebab turunnya presentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dikarenakan target yang ditetapkan KPPD Kabupaten Kulon Progo terlalu besar, selain itu kurangnya kepatuhan wajib pajak juga ikut mempengaruhi penurunan prosentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu pihak KPPD Kabupaten Kulon Progo harus lebih banyak memberikan informasi tentang arti penting membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara lebih menggiatkan kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Salah satu faktor penyebab kenaikan prosentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dikarenakan pihak KPPD Kabupaten Kulon Progo selalu mengembangkan kualitas pelayanan agar tercapainya pelayanan yang cepat dan aman. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan maka dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, kemudahan dalam membayar pajak inilah yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang nantinya akan menaikkan prosentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Jika dilihat dari rata-rata prosentase efektivitas per tahun yaitu sebesar 109,59%. Artinya penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka peluang penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo juga akan semakin besar.

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di KPPD Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 2,48%. Namun hal ini tidak berpengaruh pada besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan, karena pada tahun-tahun berikutnya kontribusinya selalu mengalami peningkatan.

Tingginya jumlah kontribusi selama tahun 2012 sampai dengan 2016 disebabkan karena KPPD Kabupaten Kulon Progo mampu melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak, salah satunya yaitu dengan meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan. Seiring dengan berkembangnya KPPD Kabupaten Kulon Progo yang ada serta diikuti pula dengan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan oleh pihak KPPD Kabupaten Kulon Progo, membuat wajib pajak merasa semakin terpuaskan dengan pelayanan

yang diberikan oleh karyawan KPPD Kabupaten Kulon Progo, hal ini terlihat dari semakin sedikitnya calo yang membantu mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kenaikan tingkat kontribusi juga disebabkan karena jumlah wajib pajak yang meningkat setiap tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan prosentase tersebut diantaranya, adanya proyek pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Baru di daerah Temon Kulon Progo. Banyak masyarakat yang menginvestasikan uang hasil pembebasan lahan dengan membeli kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Pembelian kendaraan bermotor ini akan meningkatkan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang nantinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Jika dilihat dari rata-rata prosentase kontribusi per tahun yaitu sebesar 54,42%. Artinya penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian pihak KPPD harus terus melakukan optimalisasi dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, agar penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan prosentase kontribusi yang lebih besar lagi pada Pendapatan Asli Daerah di KPPD Kulon Progo.

F. Hambatan dan Upaya dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di KPPD Kabupaten Kulon Progo

1. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di KPPD Kabupaten Kulon Progo

Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo dikatakan cukup berjalan dengan baik. Namun KPPD Kulon Progo mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil yang kurang optimal. Beberapa kendala tersebut antara lain:

a. Kurangnya Informasi dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Ketidakhahaman masyarakat atau wajib pajak mengenai informasi bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar merupakan kendala bagi KPPD Kabupaten Kulon Progo. Ketidakhahaman masyarakat mengenai pajak meliputi arti, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak. Salah satu penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak disebabkan lokasi yang jauh dalam melakukan pembayaran, sanksi yang ditetapkan dianggap terlalu kecil yaitu berupa kenaikan denda 25% per tahun dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, hal ini menyebabkan wajib pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pajak.

b. Penghindaran Tarif Pajak Progresif

Dalam hal ini yang dimaksud pajak progresif adalah tarif pajak yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor roda 4 pribadi jenis sedan, jeep, microbus dan double cabin, dengan besaran nilai presentase pajak yang semakin naik dan kenaikan ini akan berbanding lurus dengan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki seorang wajib pajak.

Untuk menghindari pajak progresif ini, warga Kulon Progo sering menggunakan nama dari saudara atau orang lain yang dipercaya sebagai pemilik Kendaraan Bermotor (KBM). Sebagai contoh, warga Kulon Progo meminjam nama dan alamat sanak saudara yang tinggal di sekitar wilayah Kulon Progo atas kepemilikan Kendaraan Bermotor (KBM) yang kedua dan berikutnya, dikarenakan apabila menggunakan nama dan alamat yang sama maka akan dikenakan tarif pajak progresif. Dengan adanya penghindaran tarif pajak progresif oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Kulon Progo maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di KPPD Kabupaten Kulon Progo.

c. Prosedur Mutasi Keluar-Masuk Kendaraan Bermotor

Sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor yang akan melakukan mutasi kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo kurang mengetahui prosedurnya sehingga banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan kepada pemerintah bahwa akan melakukan

mutasi dan menyebabkan wajib pajak terkena denda administrasi. Hal ini tentunya menghambat penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.

2. Upaya yang Dilakukan KPPD Kabupaten Kulon Progo untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, KPPD Kabupaten Kulon Progo harus melakukan upaya-upaya dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak. Adapun upaya yang dilakukan, yaitu:

a. Menggiatkan Sosialisasi Perpajakan

Dalam mengatasi kemungkinan wajib pajak yang tidak patuh, termasuk didalamnya yaitu wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak progresif dan wajib pajak yang kurang informasi mengenai prosedur keluar-masuk mutasi kendaraan. KPPD Kabupaten Kulon Progo melakukan upaya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang diberikan oleh KPPD Kabupaten Kulon Progo bersama dengan Kantor Samsat yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Kulon Progo secara terjadwal. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan juga dilakukan dengan memasang iklan di media elektronik maupun media cetak. Dengan adanya sosialisasi

ini diharapkan wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

b. Meningkatkan Layanan Unggulan untuk Wajib Pajak

Untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka KPPD Kabupaten Kulon Progo berusaha untuk lebih megefektifkan sistem pembayaran pajak yang cepat dan tepat. Sistem pelayanan yang dibuat yaitu:

- 1) Samsat Online, yaitu pelayanan pembayaran PKB secara online tidak tergantung domisili/KTP pemilik kendaraan (bebas memilih tempat pembayaran pada pelayanan keSamsatan di seluruh wilayah DIY khusus untuk pengesahan 1 tahunan).
- 2) Bus Satling, merupakan layanan pembayaran PKB dan Pengesahan Tahunan yang menggunakan sarana bus keliling dengan lokasi yang sudah terjadwal di setiap kecamatan di Kulon Progo.
- 3) *Corner* Samsat, merupakan kerjasama dengan BPD untuk membuka counter pelayanan di Kantor Cabang Pembantu.
Untuk wilayah Kabupaten Kulonprogo telah dibuka *Corner* Samsat di BPD Cabang Pembantu Nanggulan.
- 4) *Drive Thru*, merupakan layanan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak khususnya untuk pelayanan pengesahan 1 tahunan bagi kendaraan roda 4.

- 5) Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SUPER PKB), merupakan surat pemberitahuan jatuh tempo PKB serta jumlah pajak yang harus dibayar. Diberikan melalui Kepala Desa ketika sedang diadakan kegiatan pembekalan di Kantor Samsat yang nantinya supaya didistribusikan ke pihak yang bersangkutan.
- 6) SMS Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak dapat mengetahui besaran pajak kendaraan melalui SMS dengan format DIY AB... kirim ke 9600.

Peningkatan layanan unggulan yang dilakukan KPPD Kabupaten Kulon Progo kepada wajib pajak melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan (pelayanan cepat, tepat dan aman) dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya yaitu pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan menambah penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat menaikkan prosentase kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kulon Progo.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhir laporan ini akan disampaikan beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak KPPD dalam upaya perbaikan kualitas mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan kegiatan praktik kerja dan penganalisaan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan efektivitas pajak kendaraan bermotor di KPPD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan target dan potensi yang ada di wilayah Kulon Progo. Perbandingan realisasi berdasarkan target dengan tingkat rata-rata 109,59% pertahun, bila dijadikan acuan penilaian tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor maka dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini KPPD Kabupaten Kulon Progo dinilai sangat baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor penyebab meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah pihak KPPD Kulon Progo selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka peluang penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo juga akan semakin besar.

2. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012-2016 adalah sangat baik, dengan tingkat rata-rata 54,42% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini KPPD Kabupaten Kulon Progo sangat baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut sebagai pajak kendaraan bermotor. Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Baru di daerah Temon Kulon Progo menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan pajak kendaraan bermotor yang akan meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kulon Progo.
3. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya informasi dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penghindaran tarif pajak progresif dan minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur mutasi keluar-masuk kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan menggiatkan sosialisasi perpajakan dan meningkatkan layanan unggulan untuk wajib pajak diantaranya yaitu: Samsat online, bus satling, *corner* samsat, *drive thru*, surat pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (super PKB) dan sms pajak kendaraan bermotor

B. Saran

Berdasarkan pengalaman praktik kerja dan data serta informasi yang penulis dapat dari KPPD Kabupaten Kulon Progo penulis ingin memberikan saran guna perbaikan kondisi nantinya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat efektivitas dengan cara mengoptimalkan objek pajak agar memperoleh penerimaan yang lebih maksimal.
2. Agar dapat lebih meningkatkan jumlah obyek pajak, KPPD Kulon Progo dengan dibantu pihak harus sering melakukan operasi terpadu untuk menjaring kendaraan bermotor yang belum didaftarkan sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.
3. Melakukan sosialisasi yang lebih sederhana kepada wajib pajak yang ada sehingga membuat wajib pajak dengan mudah dapat mengerti mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan dengan mudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebagai contoh, melakukan sosialisasi mengenai tujuan dari diadakannya Unit Pelayanan Pembantu (UPP)/*Corner Corner* Samsat di BPD Cabang Pembantu Nanggulan, sehingga wajib pajak juga memanfaatkan fasilitas Unit Pelayanan Pembantu (UPP) yang ada dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 102 Tahun 2015 Tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Edisi 10. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Yoduke, RYFAL., dan Sri Ayem. 2015. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015*
- _____.2012.*Profil Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Kulon Progo (SAMSAT Kulon Progo)*

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
Jl. Jogja-Wates Km.27 Wates Kulonprogo Telp./Fax (0274) 773166
YOGYAKARTA 55611

SURAT KETERANGAN OBSERVASI

Nomor : 070/1146

Menunjuk Surat dari Universitas Teknologi Yogyakarta Nomor : 2859/FITB-UTY/D-K1/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 perihal Izin Memperoleh Data yang dipergunakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dan telah melaksanakan Observasi di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo dari tanggal 15 Februari sampai dengan 03 April 2017 bagi :

Nama : Diah Nastiti
Perguruan Tinggi : Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)
Yogyakarta
NIM : 3140111027
Prodi/Jurusan : Diploma 3 Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Teknologi Informasi

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wates, 07 Agustus 2017

Kepala



GUN WINARTA, SE

NIP. 19590825 198801 1 001

**TRACER STUDY PENGGUNA ALUMNI
FAKULTAS BISNIS & TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
(d/h AA Yo/STIE Yo/Fakultas Ekonomi/FITB)**

1. Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Daerah (SAMSAT) Kulon Progo
2. Alamat : Jl. Sogja Wates km.27, Gunung Gempal, Giripeni, Wates,
3. Jumlah Karyawan dari UTY : -
4. Nama karyawan yang merupakan alumni UTY

Menurut Anda, bagaimana Alumni FITB UTY dalam hal-hal berikut ini? Mohon untuk memberikan penilaian dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom penilaian untuk masing-masing jenis kemampuan.

No.	Jenis Kemampuan	Penilaian Anda			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Integritas (etika dan moral)	✓			
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)		✓		
3	Bahasa Inggris	—			
4	Penggunaan Teknologi Informasi		✓		
5	Komunikasi		✓		
6	Kerjasama tim	✓			
7	Pengembangan diri		✓		

5. Saran bagi kemajuan FITB UTY agar menghasilkan lulusan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sudah bagus, Mohon ditindaklanjuti lagi.

Kulon Progo, 8 Agustus 2017



NUGROHO HARTUTANTO, SIP
 (nama, alamat dan cap perusahaan)

PRESENSI MAGANG



FITB

NAMA : Diah Mastih
 NO.MAHASISWA : 314 0111 027
 TEMPAT MAGANG : Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal
 dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kulon Progo
 ALAMAT :

NO	HARI / TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PARAF
1	Rabu / 15 Februari	Perkenalan	W
2	Kamis / 16 Februari	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang (Kecamatan Wates J-)	W
3	Jumat / 17 Februari	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang (Kecamatan Pengasih)	A
4	Senin / 20 Februari	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang (Kecamatan Pengasih dan Kecamatan Temon)	A
5	Rabu / 22 Februari	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang (Kecamatan Kokap dan Kecamatan Panjatan)	W
6	Kamis / 23 Februari	Pelayanan loket 2 (membuat surat keterangan fiskal antar daerah)	W
7	Jumat / 24 Februari	Pelayanan loket 2 (membuat surat keterangan fiskal antar daerah)	W
8	Senin / 27 Februari	Pelayanan loket 6 (pengambilan STNK 5 tahunan)	W
9	Selasa / 28 Februari	Pelayanan loket 2 (membuat surat keterangan fiskal antar daerah)	W
10	Rabu / 1 Maret	Pelayanan loket 2 (membuat surat keterangan fiskal antar daerah)	W
11	Kamis / 2 Maret	Input data BNI ke sistem online (SIAPDI)	W

PRESENSI MAGANG



NAMA :
NO.MAHASISWA :
TEMPAT MAGANG :
ALAMAT :

FITB

NO	HARI / TANGGA / BULAN	KEGIATAN	PARAF
12	Jumat / 3 Maret	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang (kecamatan kalibawang)	h
13	Senin / 6 Maret	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang (kecamatan kalibawang dan samigaluh)	h
14	Selasa / 7 Maret	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
15	Rabu / 9 Maret	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
16	Kamis / 10 Maret	Input Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
17	Senin / 13 Maret	Bagian Arsip, mencari data denda	h
18	Selasa / 14 Maret	Bagian Arsip, mencari data denda	h
19	Rabu / 15 Maret	Bagian Arsip, mencari data denda	h
20	Kamis / 16 Maret	Input Data BNI ke sistem online (SIARDI)	h
21	Jumat / 17 Maret	Input Data BNI ke sistem online (SIARDI)	h
22	Senin / 20 Maret	Input Data BNI ke sistem online (SIARDI)	h
23	Selasa / 21 Maret	Input Data BNI ke BNI k	h
24	Rabu / 22 Maret	Input Data Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
25	Kamis / 23 Maret	Input Data Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
26	Jumat / 24 Maret	Input Data Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
27	Senin / 28 Maret	Input Data Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
28	Kamis / 30 Maret	Input Data Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
29	Jumat / 31 Maret	Input Data Wajib Pajak Belum Daftar Ulang	h
30	Senin / 9 April	Pembekalan PKB dan PBNKR	h

**TARGET/REALISASI PKB DAN BBNKB TAHUN 2008 s/d 2015 DAN PREDIKSI TAHUN 2017 DAN 2018
DENGAN DENDA DAN TANPA DENDA
KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO**

TH	TARGET			REALISASI DENGAN DENDA			REALISASI TANPA DENDA			SELISIH DENDA TANPA DENDA	% SELISIH
	PKB	BBNKB	JUMLAH	PKB	BBNKB	JUMLAH	PKB	BBNKB	JUMLAH		
2008	11.304.970.000	10.598.236.000	21.894.206.000	12.584.484.600	11.528.640.700	24.113.125.300	12.584.484.600	11.528.640.700	24.113.125.300	0	-
2009	12.676.258.000	8.670.869.000	21.347.127.000	14.513.759.400	10.709.689.000	25.223.448.400	14.513.759.400	10.709.689.000	25.223.448.400	0	-
2010	14.700.523.000	10.184.748.000	24.885.271.000	16.355.890.550	13.941.297.500	30.297.188.050	16.355.890.550	13.941.297.500	30.297.188.050	0	-
2011	18.108.728.000	14.677.802.000	32.786.530.000	19.148.495.900	15.390.636.250	34.539.132.150	18.573.164.550	15.360.128.300	33.933.292.850	605.893.300	1,79
2012	21.680.000.000	18.442.000.000	40.122.000.000	23.751.555.900	20.868.001.250	44.619.557.150	22.579.279.200	20.852.597.500	43.431.876.700	1.187.680.450	2,73
2013	24.891.900.000	19.364.100.000	44.256.000.000	28.042.693.950	27.197.398.850	55.240.092.800	26.756.650.850	27.111.889.900	53.868.540.750	1.371.552.050	2,55
2014	29.982.750.000	27.596.263.000	57.579.013.000	32.749.185.900	29.067.285.900	61.816.471.800	31.182.600.000	28.970.468.000	60.153.068.300	1.663.403.500	2,77
2015	34.467.692.000	26.424.157.000	60.891.849.000	36.889.227.100	26.963.719.800	63.852.946.900	35.005.132.400	26.846.382.300	61.851.514.700	2.001.432.200	3,24
2016	38.730.916.000	23.781.741.000	62.512.657.000	42.725.290.700	31.223.047.400	73.948.338.100	40.411.784.600	31.041.273.100	71.453.057.700	2.495.280.400	3,49
2017	41.128.600.000	23.500.000.000	66.628.600.000	41.128.600.000	25.500.000.000	66.628.600.000	41.128.600.000	25.500.000.000	66.628.600.000	0	-
2018	47.297.000.000	27.125.000.000	74.422.000.000	47.297.000.000	27.125.000.000	74.422.000.000	47.297.000.000	27.125.000.000	74.422.000.000	0	-

REALISASI PENERIMAAN PAD PROFINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2012
SAMPAI DENGAN BULAN : MARET 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA

(KPPD PROVINSI DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

2

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2012	REALISASI				Triwulan I	%	KETERANGAN
			JANUARI Rp.	PEBRUARI Rp.	MARET Rp.				
4	PENDAPATAN	33.275.688.000	3.583.409.020	3.307.131.160	3.514.550.760	10.405.090.940	31,27		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.883.710.000	3.561.897.020	3.269.064.160	3.477.316.760	10.308.277.940	31,35		
4 1 1	Pajak Daerah	32.875.142.000	3.561.596.020	3.260.605.160	3.477.015.760	10.299.216.940	31,33		
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	18.167.340.000	1.870.343.900	1.662.471.500	1.813.685.800	5.346.501.200	29,43		
01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	3.846.709.800	408.911.700	365.206.300	449.738.900	1.223.856.900	31,82		
01	- Sedan	609.666.100	51.657.500	44.141.000	66.485.300	162.483.800	26,64		
02	- Jeep	307.025.600	34.504.300	36.269.000	30.883.200	101.756.500	33,14		
03	- Station Wagon	2.929.718.100	322.549.900	284.798.300	352.270.400	959.616.600	32,75		
02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.433.000	846.000	255.000	-	1.101.000	8,86		
01	- Sedan	-	-	-	-	-	-		
02	- Jeep	-	-	-	-	-	-		
03	- Station Wagon	12.433.000	846.000	255.000	-	1.101.000	8,86		
11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	-	14.026.100	3.988.200	4.442.000	22.456.300			
01	- Sedan	-	1.390.000	-	-	1.390.000			
02	- Jeep	-	1.460.700	165.000	-	1.626.700			
03	- Station Wagon	-	11.175.400	3.823.200	4.442.000	19.440.600			
03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	27.908.100	4.410.400	570.000	4.872.000	9.852.400	35,30		
01	- Bus	-	-	-	-	-	-		
02	- Micro Bus	27.908.100	4.410.400	570.000	4.872.000	9.852.400	35,30		

REALISASI PENERIMAAN PAD PROPINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2012
SAMPAI DENGAN BULAN : JUNI 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20
Organisasi : 1.20.05

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
DPPKA
(KPPD PROVINSI DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2012	REALISASI					%
			Triwulan I	APRIL Rp.	MEI Rp.	JUNI Rp.	s/d Triwulan II	
4	PENDAPATAN	33.275.688.000	10.405.090.940	2.998.280.060	3.526.954.860	3.359.740.360	20.290.066.220	60,98
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.883.710.000	10.308.277.940	2.964.108.060	3.491.787.860	3.323.710.360	20.087.884.220	61,09
4 1 1	Pajak Daerah	32.875.142.000	10.299.216.940	2.963.891.060	3.491.549.860	3.323.423.360	20.078.081.220	61,07
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	18.167.340.000	5.346.501.200	1.688.132.800	1.976.382.000	1.828.678.000	10.839.694.000	59,67
	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	3.846.709.800	1.223.856.900	387.973.100	541.033.500	473.271.300	2.626.134.800	68,27
01	- Sedan	609.666.100	162.483.800	50.352.600	78.501.300	64.566.500	355.896.200	58,35
02	- Jeep	307.025.600	101.766.500	34.317.600	68.356.500	31.068.500	235.498.100	76,70
03	- Station Wagon	2.929.718.100	959.616.600	303.302.900	384.176.700	377.644.300	2.034.740.500	69,45
	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.433.000	1.101.000	2.424.000	402.600	665.600	4.593.200	36,94
01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-
02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
03	- Station Wagon	12.433.000	1.101.000	2.424.000	402.600	665.600	4.593.200	36,94
	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	-	22.456.300	3.194.300	5.216.900	10.750.200	41.617.700	-
01	- Sedan	-	1.390.000	-	-	-	1.390.000	-
02	- Jeep	-	1.625.700	216.200	525.000	981.300	3.348.200	-
03	- Station Wagon	-	18.440.600	2.978.100	4.691.900	9.768.900	36.879.500	-
	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	27.908.100	9.852.400	3.370.400	742.500	-	13.965.300	50,04
01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-
02	- Micro Bus	27.908.100	9.852.400	3.370.400	742.500	-	13.965.300	50,04

04		B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	57.166.600	52.884.900	3.117.500	16.708.500	2.292.600	75.003.500	131.20
	01	- Bus	24.009.600	45.033.000		15.275.400	-	60.308.400	251,18
	02	- Micro Bus	33.157.000	7.851.900	3.117.500	1.433.100	2.292.600	14.695.100	44,32
4	1	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)		650.000		-	-	650.000	
	01	- Bus		-	-	-	-	-	
	02	- Micro Bus		650.000	-	-	-	650.000	
05		C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	1.951.162.700	527.395.600	200.056.000	242.761.800	197.618.400	1.167.831.800	59,85
	01	- Truck	908.123.400	228.364.000	78.673.500	112.103.100	92.913.400	512.054.000	56,39
	02	- Pick Up	1.043.039.300	299.031.600	121.382.500	130.658.700	104.705.000	655.777.800	62,87
4	1	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	209.265.000	95.368.800	30.859.800	28.398.300	19.802.400	174.429.300	83,35
	01	- Truck	208.836.000	95.368.800	30.859.800	28.398.300	19.802.400	174.429.300	83,52
	02	- Pick Up	429.000	-	-	-	-	-	-
13		C-3 Truck, Pick Up (Dinas)		7.789.700	273.000	917.500	723.200	9.703.400	
	01	- Truck		3.084.000	-	917.500	-	4.011.500	
	02	- Pick Up		4.685.700	273.000	-	723.200	5.691.900	
09		E-1 Sepeda Motor (R.2 / R.3, Tidak Umum)	12.062.894.800	3.397.611.700	1.055.653.600	1.139.288.000	1.120.806.700	6.713.360.000	55,65
15		E-3 Sepeda Motor (R.2 / R.3, Dinas)	-	7.533.900	1.211.100	912.400	2.747.600	12.405.000	
4	1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.677.802.000	4.944.053.900	1.272.995.000	1.512.252.000	1.491.842.500	9.221.143.400	62,82
01		A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	2.823.716.500	1.224.255.000	249.160.000	387.700.000	394.960.000	2.256.075.000	79,90
	01	- Sedan	19.577.500	9.980.000	-	-	-	9.980.000	50,98
	02	- Jeep	300.120.000	93.716.000	28.600.000	30.000.000	-	152.315.000	50,75
	03	- Station Wagon	2.504.019.000	1.120.560.000	220.560.000	357.700.000	364.960.000	2.093.780.000	83,62
02		A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)		-	-	-	-	-	
	01	- Sedan		-	-	-	-	-	
	02	- Jeep		-	-	-	-	-	
	03	- Station Wagon		-	-	-	-	-	
11		A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)		73.640.000	-	-	67.800.000	141.440.000	
	01	- Sedan		-	-	-	-	-	
	02	- Jeep		-	-	-	-	-	

REALISASI PENERIMAAN PAD PROPINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2012
SAMPAI DENGAN BULAN : SEPTEMBER 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD PROVINSI DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2012	REALISASI				%	
			s/d Triwulan II	JULI Rp.	AGUSTUS Rp.	SEPTEMBER Rp.		s/d Triwulan III
4	PENDAPATAN	33.275.688.000	20.290.066.220	4.856.547.660	3.675.798.160	4.137.270.060	32.959.682.100	99,05
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.883.710.000	20.087.884.220	4.813.329.660	3.636.483.160	4.091.767.060	32.629.464.100	99,23
4 1 1	Pajak Daerah	32.875.142.000	20.078.081.220	4.812.114.660	3.636.210.160	4.091.459.060	32.617.865.100	99,22
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	18.167.340.000	10.839.694.000	2.166.620.400	2.073.901.700	2.133.694.700	17.213.910.800	94,75
01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	3.846.709.800	2.626.134.800	501.313.600	509.875.900	534.988.700	4.172.313.000	108,46
02	- Sedan	609.866.100	355.666.200	76.172.000	77.815.400	80.102.300	589.985.900	96,72
03	- Jeep	307.025.600	235.498.100	17.151.000	35.587.200	41.799.900	330.036.200	107,49
02	- Station Wagon	2.929.718.100	2.034.740.500	407.690.600	396.473.300	413.086.500	3.252.290.900	111,01
02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.433.000	4.593.200	2.739.300	1.081.500	1.128.000	9.542.000	76,75
01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-
02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
03	- Station Wagon	12.433.000	4.593.200	2.739.300	1.081.500	1.128.000	9.542.000	76,75
11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	-	41.617.700	9.345.900	7.049.500	6.289.800	64.302.900	-
01	- Sedan	-	1.390.000	-	-	-	1.390.000	-
02	- Jeep	-	3.948.200	150.000	575.000	-	4.073.200	-
03	- Station Wagon	-	36.879.500	9.195.900	6.474.500	6.289.800	58.839.700	-
03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	27.908.100	13.965.300	5.523.800	6.113.900	2.836.300	28.439.300	101,90
01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-
02	- Micro Bus	27.908.100	13.965.300	5.523.800	6.113.900	2.836.300	28.439.300	101,90

REALISASI PENERIMAAN PAD PROPINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2012
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD PROVINSI DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2012	REALISASI				%	
			s/d Triwulan III	OKTOBER Rp.	NOPEMBER Rp.	DESEMBER Rp.		s/d Triwulan IV
4	PENDAPATAN	40.261.223.000	32.959.682.100	4.305.218.840	3.784.144.080	4.098.476.910	45.147.521.930	112,14
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.840.225.000	32.629.464.100	4.259.729.840	3.742.097.080	4.039.039.910	44.670.330.930	112,12
4 1 1	Pajak Daerah	39.830.730.000	32.617.965.100	4.259.463.840	3.740.931.080	4.038.301.910	44.656.561.930	112,12
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	21.680.000.000	17.213.910.800	2.273.042.900	2.111.348.500	2.153.253.700	23.751.555.900	109,56
01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	5.034.648.000	4.172.313.000	547.614.900	523.439.000	584.609.400	5.827.976.300	115,76
02	- Sedan	681.317.000	589.985.900	70.663.900	72.623.700	77.502.600	810.676.100	118,99
03	- Jeep	478.075.000	330.036.200	33.529.400	31.244.600	43.446.400	438.256.600	91,67
02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	3.875.266.000	3.252.290.900	443.621.600	419.570.700	483.860.400	4.579.043.600	118,16
01	- Sedan	9.185.000	9.542.000	1.230.000	1.207.700	312.000	12.291.700	133,82
02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
03	- Station Wagon	9.185.000	9.542.000	1.230.000	1.207.700	312.000	12.291.700	133,82
11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	69.523.000	64.302.900	6.576.900	6.186.000	11.177.000	88.242.800	126,93
01	- Sedan	1.390.000	1.390.000	-	-	-	1.390.000	100,00
02	- Jeep	4.733.000	4.073.200	160.000	-	-	4.233.200	89,44
03	- Station Wagon	63.400.000	58.839.700	6.416.900	6.186.000	11.177.000	82.619.600	130,31
03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	32.659.000	28.439.300	6.122.400	8.682.500	3.162.300	46.406.500	142,09
01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-
02	- Micro Bus	32.659.000	28.439.300	6.122.400	8.682.500	3.162.300	46.406.500	142,09

REALISASI PENERIMAAN PAD PROPINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2013
SAMPAI DENGAN BULAN : MARET 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

2

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2013	REALISASI				%	KETERANGAN
			JANUARI Rp.	PEBRUARI Rp.	MARET Rp.	Triwulan I		
4	PENDAPATAN	44.299.745.000	4.843.733.750	4.380.730.150	4.390.892.800	13.615.356.700	30,73	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.299.745.000	4.843.733.750	4.380.730.150	4.390.892.800	13.615.356.700	30,73	
4 1 1	Pajak Daerah	44.287.800.000	4.843.404.750	4.380.485.150	4.380.512.800	13.604.402.700	30,72	
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	24.891.900.000	2.286.088.250	2.092.273.500	2.117.314.500	6.495.676.250	26,10	
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Trans Umum)	5.423.625.000	584.559.500	584.950.600	576.900.400	1.766.450.500	32,57	
04 01	- Sedan	745.469.000	67.878.800	55.416.700	66.353.900	189.649.400	25,44	
04 02	- Jeep	488.006.000	40.745.300	61.743.800	39.327.900	141.817.000	29,06	
04 03	- Station Wagon	4.190.150.000	485.975.400	477.790.100	471.218.600	1.434.984.100	34,25	
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.855.000	1.344.000	-	760.000	2.104.000	16,37	
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	
04 03	- Station Wagon	12.855.000	1.344.000	-	760.000	2.104.000	16,37	
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	78.840.000	16.371.100	2.080.700	5.742.100	24.193.900	30,69	
04 01	- Sedan	1.390.000	1.360.000	-	-	1.360.000	97,84	
04 02	- Jeep	4.733.000	1.240.000	-	187.100	1.427.100	30,15	
04 03	- Station Wagon	72.717.000	13.771.100	2.080.700	5.555.000	21.406.800	29,44	
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	44.337.000	11.118.500	2.373.800	3.150.000	16.642.300	37,54	
04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-	
04 02	- Micro Bus	44.337.000	11.118.500	2.373.800	3.150.000	16.642.300	37,54	

4	1	1	01	04			B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	103.005.000	4.202.000	4.294.700	5.172.700	13.689.400	13,27
			04	01			- Bus	103.005.000	1.300.400	-	1.897.400	3.197.800	3,10
			04	02			- Micro Bus	-	2.901.600	4.294.700	3.275.300	10.471.600	
4	1	1	01	12			B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	2.750.000	650.000	-	-	650.000	23,64
			04	01			- Bus	-	-	-	-	-	
			04	02			- Micro Bus	2.750.000	650.000	-	-	650.000	23,64
4	1	1	01	05			C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	2.465.383.000	189.704.800	206.946.300	189.487.300	586.138.400	23,77
			04	01			- Truck	1.115.484.000	64.915.300	84.883.200	71.320.300	221.118.800	19,82
			04	02			- Pick Up	1.349.899.000	124.789.500	122.063.100	118.167.000	365.019.600	27,04
4	1	1	01	06			C-2 Truck, Pick Up (Umum)	370.800.000	60.601.400	34.870.300	48.480.700	143.952.400	38,82
			04	01			- Truck	369.931.000	60.601.400	34.870.300	48.480.700	143.952.400	38,81
			04	02			- Pick Up	869.000	-	-	-	-	-
4	1	1	01	13			C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	23.347.000	3.317.900	1.660.600	2.716.200	8.294.700	34,64
			04	01			- Truck	9.576.000	3.065.900	188.500	850.300	4.124.700	43,07
			04	02			- Pick Up	14.371.000	832.000	1.472.100	1.865.900	4.170.000	29,02
4	1	1	01	09			E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	16.332.108.000	1.398.354.950	1.243.660.900	1.283.553.800	3.926.169.550	24,04
4	1	1	01	15			E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	34.250.000	4.524.200	1.435.600	1.351.300	7.411.100	21,64
4	1	1	03				Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.364.100.000	2.554.069.400	2.283.176.250	2.258.262.100	7.095.507.750	36,64
4	1	1	03	01			A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Trax umum)	4.713.310.000	962.965.700	865.190.300	906.941.000	2.735.097.000	58,03
			04	01			- Sedan	23.290.000	30.206.500	9.737.500	30.797.500	70.741.500	303,74
			04	02			- Jeep	325.460.000	31.300.000	94.465.000	32.590.000	158.355.000	48,66
			04	03			- Station Wagon	4.364.650.000	901.459.200	760.987.800	843.553.500	2.506.000.500	57,42
4	1	1	03	02			A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	-	-	-	-
			04	01			- Sedan	-	-	-	-	-	-
			04	02			- Jeep	-	-	-	-	-	-
			04	03			- Station Wagon	-	-	-	-	-	-
4	1	1	03	11			A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	88.360.000	-	-	-	-	-
			04	01			- Sedan	-	-	-	-	-	-
			04	02			- Jeep	-	-	-	-	-	-

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2013
SAMPAI DENGAN BULAN : JUNI 2013

Urusan Pemerintahan 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2013	REALISASI					%
			Triwulan I	APRIL Rp.	MEI Rp.	JUNI Rp.	s/d Triwulan II	
4	PENDAPATAN	44.299.745.000	13.615.356.700	4.372.701.500	4.148.255.200	3.947.626.300	26.083.339.800	58,88
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.299.745.000	13.615.356.700	4.372.701.500	4.148.255.200	3.947.626.300	26.083.339.800	58,88
4 1 1	Pajak Daerah	44.287.800.000	13.604.402.700	4.372.421.500	4.148.031.200	3.945.700.300	26.070.555.800	58,87
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	24.891.900.000	6.455.676.250	2.205.211.000	2.148.252.300	2.048.800.800	12.897.340.350	51,82
01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Trak Umum)	5.423.625.000	1.766.450.500	607.996.200	628.772.900	565.786.000	3.569.005.500	65,80
	-Sedan	745.469.000	189.649.400	71.181.400	81.993.100	74.974.400	417.796.300	56,05
	- Jeep	488.006.000	141.817.000	53.014.300	65.809.600	30.107.900	290.748.800	59,58
	- Station Wagon	4.190.150.000	1.434.984.100	483.800.500	480.970.200	460.703.700	2.860.458.500	68,27
02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.855.000	2.104.000	2.606.000	666.000	-	5.376.000	41,82
	-Sedan	-	-	-	-	-	-	-
	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
	- Station Wagon	12.855.000	2.104.000	2.606.000	666.000	-	5.376.000	41,82
11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	78.840.000	24.193.900	5.965.800	8.499.100	9.589.700	48.248.500	61,20
	-Sedan	1.390.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	97,84
	-Jeep	4.733.000	1.427.100	-	590.000	760.000	2.777.100	58,68
	- Station Wagon	72.717.000	21.406.800	5.965.800	7.909.100	8.829.700	44.111.400	60,66
03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	44.337.000	16.642.300	5.135.500	667.500	7.631.200	30.076.500	67,84
	- Bus	-	-	-	-	-	-	-
	- Micro Bus	44.337.000	16.642.300	5.135.500	667.500	7.631.200	30.076.500	67,84

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2013
SAMPAI DENGAN BULAN : SEPTEMBER 2013

Urusan Pemerintahan 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2013	REALISASI					%
			sid Triwulan II	JULI Rp.	AGUSTUS Rp.	SEPTEMBER Rp.	sid Triwulan III	
4	PENDAPATAN	44.299.745.000	26.083.939.800	5.585.744.000	4.334.642.400	4.858.705.100	40.863.031.300	92,24
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.299.745.000	26.083.939.800	5.585.744.000	4.334.642.400	4.858.705.100	40.863.031.300	92,24
4 1 1	Pajak Daerah	44.287.800.000	26.070.555.800	5.585.485.000	4.334.355.400	4.858.453.100	40.848.849.300	92,23
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	24.891.900.000	12.897.940.350	2.719.365.700	2.302.317.500	2.513.676.000	20.433.299.550	82,09
01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Trak umum)	5.423.625.000	3.569.005.500	769.120.200	567.811.500	670.170.500	5.576.107.800	102,81
	-Sedan	745.469.000	417.798.900	79.317.200	77.053.900	83.733.800	657.903.200	88,25
	- Jeep	488.006.000	290.748.800	40.161.300	30.545.800	50.427.200	411.863.100	84,40
	- Station Wagon	4.190.150.000	2.860.458.500	649.641.700	460.211.800	536.009.500	4.506.321.500	107,55
02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.855.000	5.376.000	2.404.200	750.000	1.025.800	9.556.000	74,34
	-Sedan	-	-	-	-	-	-	-
	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
	- Station Wagon	12.855.000	5.376.000	2.404.200	750.000	1.025.800	9.556.000	74,34
11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	78.840.000	48.248.500	7.697.400	2.696.300	9.618.700	68.260.900	86,58
	- Sedan	1.390.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	97,84
	- Jeep	4.733.000	2.777.100	150.000	-	575.000	3.502.100	73,99
	- Station Wagon	72.717.000	44.111.400	7.547.400	2.696.300	9.043.700	63.398.800	87,19
03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	44.337.000	30.076.500	5.830.000	2.581.800	8.536.600	47.025.000	105,06
	- Bus	-	-	-	-	-	-	-
	- Micro Bus	44.337.000	30.076.500	5.830.000	2.581.800	8.536.600	47.025.000	105,06

REALISASI PENERIMAAN PAD PROPINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2013
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER 2013

Urusan Pemerintahan 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi 1.20.05 DPPKA
(KPPD PROVINSI DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2013	REALISASI				s/d Triwulan IV	%
			s/d Triwulan III	OKTOBER Rp.	NOPEMBER Rp.	DESEMBER Rp.		
4	PENDAPATAN	52.019.494.000	40.863.031.300	4.829.290.100	4.819.173.700	4.807.234.400	55.318.729.500	106,34
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.019.494.000	40.863.031.300	4.829.290.100	4.819.173.700	4.807.234.400	55.318.729.500	106,34
4 1 1	Pajak Daerah	52.007.549.000	40.848.849.300	4.829.045.100	4.817.135.700	4.806.968.400	55.301.998.500	106,33
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	26.885.772.000	20.433.299.550	2.620.617.600	2.518.661.600	2.470.115.200	28.042.693.950	104,30
01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Trax Umum)	6.634.681.000	5.576.107.800	714.869.000	630.908.500	635.331.700	7.557.217.000	113,90
	- Sedan	787.013.000	657.903.200	64.386.100	93.750.700	87.381.200	903.421.200	114,79
	- Jeep	516.128.000	411.883.100	35.859.300	34.176.500	33.019.000	514.937.900	98,77
	- Station Wagon	5.331.540.000	4.506.321.500	614.623.600	502.981.300	514.931.500	6.138.857.900	115,14
02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	13.597.000	9.556.000	828.000	1.009.600	738.600	12.132.200	89,23
	- Sedan							
	- Jeep							
	- Station Wagon	13.597.000	9.556.000	828.000	1.009.600	738.600	12.132.200	89,23
11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	83.123.000	68.260.900	4.022.600	8.741.500	13.505.700	94.530.700	113,72
	- Sedan	1.390.000	1.360.000				1.360.000	97,84
	- Jeep	4.826.000	3.502.100	200.000			3.702.100	76,71
	- Station Wagon	76.907.000	63.398.800	3.822.600	8.741.500	13.505.700	89.468.600	116,33
03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	46.892.000	47.025.000	6.065.800	5.073.800	789.600	58.954.200	125,72
	- Bus							
	- Micro Bus	46.892.000	47.025.000	6.065.800	5.073.800	789.600	58.954.200	125,72

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
 TAHUN ANGGARAN 2014
 SAMPAI DENGAN BULAN : MARET 2014
 Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
 Organisasi : 1.20.05 DPPKA
 (KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2014	REALISASI				%
			JANUARI Rp.	PEBRUARI Rp.	MARET Rp.	Triwulan I	
4	PENDAPATAN	60.967.524.000	5.931.581.800	4.908.937.400	5.487.738.800	16.328.258.000	26,78
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.967.524.000	5.931.581.800	4.908.937.400	5.487.738.800	16.328.258.000	26,78
4 1 1	Pajak Daerah	60.951.849.000	5.929.710.800	4.901.586.400	5.487.451.800	16.318.749.000	26,77
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	32.467.692.000	3.148.647.500	2.734.439.200	2.997.451.400	8.880.538.100	27,35
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	1.001.605.400	825.562.400	935.722.500	2.762.890.300	35,60
04 01	- Sedan	859.207.000	88.187.500	76.985.600	76.459.800	240.592.900	25,08
04 02	- Jeep	663.034.000	72.913.600	54.973.600	72.490.900	200.378.100	30,22
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	840.524.300	693.623.200	787.771.800	2.321.919.300	37,83
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	1.100.800	204.000	264.000	1.568.800	12,92
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	12.144.000	1.100.800	204.000	264.000	1.568.800	12,92
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	15.651.600	8.645.200	8.128.900	32.425.700	30,00
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	-	-	1.360.000	90,97
04 02	- Jeep	5.081.000	1.355.000	-	-	1.355.000	26,77
04 03	- Station Wagon	101.516.000	12.936.600	8.645.200	8.128.900	29.710.700	29,27
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	7.529.900	3.510.000	6.626.300	17.666.200	33,00
04 01	- Bus	-	4.718.900	-	-	4.718.900	-
04 02	- Micro Bus	53.537.000	2.811.000	3.510.000	6.626.300	12.947.300	24,18
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	6.518.500	3.438.000	8.066.400	18.022.900	43,74

4	1	1	03	03		B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.410.000	-	1.110.000	412.500	1.522.500	
			04	01		- Bus	-	-	-	-	-	
			04	02		- Micro Bus	3.410.000	-	1.110.000	412.500	1.522.500	
4	1	1	03	04		B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	949.000	11.640.000	-	-	11.640.000	
			04	01		- Bus	-	-	-	-	-	
			04	02		- Micro Bus	949.000	11.640.000	-	-	11.640.000	
4	1	1	03	12		B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	65.800.000	-	-	65.800.000	
			04	01		- Bus	-	32.500.000	-	-	32.500.000	
			04	02		- Micro Bus	-	33.300.000	-	-	33.300.000	
4	1	1	03	05		C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	2.061.236.000	247.590.500	198.179.500	203.637.000	649.407.000	31,51
			04	01		- Truck	260.307.000	43.930.000	3.090.000	3.760.000	50.780.000	19,51
			04	02		- Pick Up	1.800.929.000	203.660.500	195.089.500	199.877.000	598.627.000	33,24
4	1	1	03	06		C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.913.592.000	116.624.000	160.332.000	62.096.000	339.052.000	17,72
			04	01		- Truck	1.892.004.000	105.760.000	160.332.000	61.320.000	327.412.000	17,31
			04	02		- Pick Up	21.588.000	10.864.000	-	776.000	11.640.000	
4	1	1	03	13		C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	40.891.000	21.087.500	-	-	21.087.500	51,57
			04	01		- Truck	-	18.800.000	-	-	18.800.000	
			04	02		- Pick Up	40.891.000	2.287.500	-	-	2.287.500	5,59
								1.140.000			1.140.000	
4	1	1	03	09	01	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	15.878.235.000	1.305.503.300	1.028.858.500	1.217.632.600	3.551.994.400	22,37
4	1	1	03	15	04	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	41.164.000	17.250.000	-	1.549.600	18.799.600	45,67
4	1	1	06			Pajak Air Permukaan	60.000.000	6.300.000	6.400.000	6.850.000	19.550.000	32,58
			01	04	01	Pajak Air Permukaan	60.000.000	6.300.000	6.400.000	6.850.000	19.550.000	32,58
4	1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.675.000	1.871.000	7.351.000	287.000	9.509.000	60,66
			17			Pendapatan Dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.700.000	1.500.000	7.050.000	-	8.550.000	67,32
			01			Sewa Tanah Dan Bangunan	4.000.000	-	2.200.000	-	2.200.000	55,00
			04	01		- Sewa Tempat Kantin	2.000.000	-	1.100.000	-	1.100.000	55,00
						- Sewa Tempat Foto Copy	2.000.000	-	1.100.000	-	1.100.000	55,00

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2014
SAMPAI DENGAN BULAN : JUNI 2015

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2014	Triwulan I	REALISASI						%
				APRIL Rp.	MEI Rp.	JUNI Rp.	s/d Triwulan II			
4	PENDAPATAN	60.967.524.000	16.328.258.000	4.983.879.500	4.542.225.300	5.067.842.700	30.922.205.500	50,72		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.967.524.000	16.328.258.000	4.983.879.500	4.542.225.300	5.067.842.700	30.922.205.500	50,72		
4 1 1	Pajak Daerah	60.951.849.000	16.318.749.000	4.983.557.500	4.541.882.300	5.067.520.700	30.911.709.500	50,71		
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	32.467.692.000	8.880.538.100	2.799.559.100	2.681.973.400	2.972.135.900	17.334.206.500	53,39		
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	2.762.890.300	853.656.000	845.593.500	952.667.900	5.414.807.700	69,78		
04 01	- Sedan	959.207.000	240.592.900	74.116.800	100.072.900	101.302.000	516.084.600	53,80		
04 02	- Jeep	663.034.000	200.378.100	63.549.800	50.389.900	80.327.800	394.645.700	59,52		
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	2.321.919.300	715.989.300	665.130.700	771.038.100	4.504.077.400	73,38		
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	1.568.800	1.286.600	674.300	292.000	3.821.700	31,47		
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-		
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-		
04 03	- Station Wagon	12.144.000	1.568.800	1.286.600	674.300	292.000	3.821.700	31,47		
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	32.423.700	12.549.600	7.898.800	8.295.900	61.170.000	56,60		
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	352.000	760.000	-	1.360.000	90,97		
04 02	- Jeep	5.061.000	1.355.000	12.197.600	7.139.800	8.295.900	57.343.000	56,49		
04 03	- Station Wagon	101.516.000	29.710.700	8.118.200	6.031.000	7.815.000	39.630.400	74,02		
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	17.666.200	8.118.200	6.031.000	7.815.000	39.630.400	74,02		
04 01	- Bus	-	4.718.900	-	-	-	4.718.900	-		
04 02	- Micro Bus	53.537.000	12.947.300	8.118.200	6.031.000	7.815.000	34.911.500	65,21		
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	18.022.900	7.489.800	2.973.000	3.321.500	31.807.200	77,19		

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2014
SAMPAI DENGAN BULAN : SEPTEMBER 2014

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2014	s/d Triwulan II	REALISASI			%
				JULI Rp.	AGUSTUS Rp.	SEPTEMBER Rp.	
				s/d Triwulan III			
4	PENDAPATAN	55.144.726.000	29.619.637.900	5.370.743.100	5.525.300.400	45.641.007.700	82,77
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.144.726.000	29.619.637.900	5.370.743.100	5.525.300.400	45.641.007.700	82,77
4 1 1	Pajak Daerah	55.129.051.000	29.604.272.900	5.370.337.100	5.524.989.400	45.624.578.700	82,76
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	28.232.776.000	15.144.252.300	2.838.810.000	2.970.986.300	23.734.515.600	84,07
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	6.747.852.000	4.393.339.200	792.717.700	866.806.700	6.883.387.800	102,01
4 1 1 01 02	- Sedan	834.083.000	431.632.300	116.346.300	72.521.300	688.786.500	83,78
4 1 1 01 03	- Jeep	576.551.000	299.817.300	49.858.100	54.082.500	453.662.000	78,69
4 1 1 01 04	A-2 Station Wagon	5.337.208.000	3.661.888.600	626.513.300	740.202.900	5.730.839.300	107,38
4 1 1 01 05	- Station Wagon (Umum)	10.560.000	4.683.100	978.600	5.526.300	12.874.000	121,91
4 1 1 01 06	- Sedan	-	-	-	-	-	-
4 1 1 01 07	- Jeep	-	-	-	-	-	-
4 1 1 01 08	- Station Wagon	10.560.000	4.683.100	978.600	5.526.300	12.874.000	121,91
4 1 1 01 09	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	93.976.000	60.547.000	2.235.000	6.540.000	78.604.200	83,64
4 1 1 01 10	- Sedan	1.300.000	1.360.000	-	-	1.360.000	104,62
4 1 1 01 11	- Jeep	4.401.000	2.825.000	552.400	575.000	4.052.400	92,08
4 1 1 01 12	- Station Wagon	88.275.000	56.262.000	2.235.000	5.965.000	73.191.800	82,91
4 1 1 01 13	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	46.554.000	42.575.600	8.412.200	4.575.000	63.570.800	136,55
4 1 1 01 14	- Bus	-	-	-	-	-	-
4 1 1 01 15	- Micro Bus	46.554.000	42.575.600	8.412.200	4.575.000	63.570.800	136,55
4 1 1 01 16	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	35.832.000	62.449.800	3.409.500	3.233.800	72.921.400	203,51

4	1	4	20	01	Lain-lain	2.975.000	1.911.000	357.000	406.000	301.000	2.975.000	100,00
					- Pembuatan STNKB (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	2.975.000	1.911.000	357.000	406.000	301.000	2.975.000	100,00
					J U M L A H =	55.144.726.000	29.619.637.900	5.125.326.300	5.370.743.100	5.525.300.400	45.641.007.700	82,77

Kulon Progo, 01 Oktober 2014

Mengetahui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE.
NIP. 19690825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	514.815.869,39	301.336.000,00	52.077.000	55.362.000	59.867.000	468.642.000	91,03
4	3	1			Pendapatan Hibah						-	
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	514.815.869,39	301.336.000,00	52.077.000	55.362.000	59.867.000	468.642.000	91,03
				01	Dealer Otomotif	260.083.731,07	175.578.000,00	29.705.000	30.480.000	34.575.000	270.338.000	103,94
				04	PT. Jasa Raharja	254.732.138,32	125.758.000,00	22.372.000	24.882.000	25.292.000	198.304.000	77,85
					J U M L A H =	514.815.869,39	301.336.000,00	52.077.000,00	55.362.000,00	59.867.000,00	468.642.000	91,03

Kulon Progo, 01 Oktober 2014

Mengetahui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE.
NIP. 19690825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2014
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER 2014

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2014 PRBHN	s/d Triwulan III	REALISASI				%
				OKTOBER Rp.	NOVEMBER Rp.	DESEMBER Rp.	s/d Triwulan IV	
4	PENDAPATAN	57.654.726.000	45.641.007.700	5.291.851.400	5.494.918.300	5.481.303.400	61.909.080.800	107,38
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.654.726.000	45.641.007.700	5.291.851.400	5.494.918.300	5.481.303.400	61.909.080.800	107,38
4 1 1	Pajak Daerah	57.639.051.000	45.624.578.700	5.291.571.400	5.493.638.300	5.480.009.400	61.889.797.800	107,37
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	29.982.776.000	23.734.515.600	3.033.622.600	2.949.254.900	3.031.792.800	32.749.185.900	109,23
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	8.008.639.240	6.883.387.800	856.654.800	847.495.900	876.128.200	9.463.666.700	118,17
04 01	- Sedan	888.757.100.00	688.786.500	97.724.000	104.705.600	92.884.600	694.100.700	111,85
04 02	- Jeep	588.292.325.00	453.662.000	50.310.000	54.139.900	67.527.200	625.639.100	106,35
04 03	- Station Wagon	6.531.589.915.00	5.730.939.300	708.620.800	688.650.400	715.716.400	7.843.926.900	120,09
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	10.560.000	12.874.000	4.221.000	180.000	492.000	17.767.000	168,25
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	10.560.000	12.874.000	4.221.000	180.000	492.000	17.767.000	168,25
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	95.229.600	78.604.200	8.159.100	14.963.500	11.938.700	113.665.500	119,36
04 01	- Sedan	1.360.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	100,00
04 02	- Jeep	4.401.000	4.052.400	-	-	-	4.052.400	92,08
04 03	- Station Wagon	89.468.600	73.191.800	8.159.100	14.963.500	11.938.700	108.263.100	121,00
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	49.554.000	63.570.800	10.383.600	9.428.700	5.360.000	88.743.100	179,08
04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-
04 02	- Micro Bus	49.554.000.00	63.570.800	10.383.600	9.428.700	5.360.000	88.743.100	179,08

4	1	1	01	04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	77.859.700	72.921.400	13.071.000	7.887.800	9.109.300	102.989.500	132.28
			04	01	- Bus	43.343.700	44.176.400	8.845.400	282.000	4.684.400	57.988.200	133,79
			04	02	- Micro Bus	34.516.000	28.745.000	4.225.600	7.605.800	4.424.900	45.001.300	130,38
4	1	1	01	12	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	2.800.000	3.650.000	-	-	137.500	3.787.500	135,27
			04	01	- Bus	-	815.000	-	-	-	815.000	
			04	02	- Micro Bus	2.800.000	2.835.000	-	-	137.500	2.972.500	106,16
4	1	1	01	05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	2.845.947.260	2.431.501.700	343.426.500	317.036.800	318.002.400	3.409.967.400	119,82
			04	01	- Truck	1.183.554.000	800.421.000	141.714.400	86.602.100	127.200.600	1.164.838.100	97,80
			04	02	- Pick Up	1.662.393.260	1.631.080.700	201.712.100	221.434.700	190.801.800	2.245.029.300	136,87
4	1	1	01	08	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	622.087.300	706.613.100	105.215.800	117.218.800	94.637.200	1.023.684.900	164,56
			04	01	- Truck	618.515.000	689.283.200	102.311.200	115.029.600	92.120.400	1.008.744.400	163,09
			04	02	- Pick Up	3.572.300	7.329.900	2.904.600	2.189.200	2.516.800	14.940.500	418,23
4	1	1	01	13	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	32.623.900	17.971.200	2.663.400	8.306.800	9.554.000	38.495.400	118,00
			04	01	- Truck	10.086.000	6.177.800	2.071.900	2.229.300	1.755.000	12.234.000	121,54
			04	02	- Pick Up	22.537.900	11.793.400	591.500	6.077.500	7.799.000	26.261.400	116,42
4	1	1	01	09	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	18.199.435.000	13.440.290.400	1.682.960.300	1.618.553.900	1.701.893.100	18.443.687.700	101,34
4	1	1	01	15	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	38.040.000	23.131.000	6.867.100	8.182.700	4.540.400	42.721.200	112,31
4	1	1	03		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.596.275.000	21.836.987.100	2.251.348.800	2.537.683.400	2.441.268.600	29.067.285.900	105,33
4	1	1	03	01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	8.074.355.000	6.825.240.300	697.734.800	760.083.800	966.390.900	9.249.449.800	114,55
			04	01	- Sedan	203.333.000	217.822.300	10.968.500	9.910.000	10.863.800	249.564.600	122,74
			04	02	- Jeep	356.143.000	430.732.500	38.643.800	38.020.000	149.457.500	654.853.800	183,87
			04	03	- Station Wagon	7.514.879.000	6.176.685.500	650.122.500	712.153.800	806.069.600	8.345.031.400	111,05
4	1	1	03	02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	-	38.895.000	28.800.000	-	-	67.695.000	
			04	01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	
			04	02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	
			04	03	- Station Wagon	-	38.895.000	28.800.000	-	-	67.695.000	
4	1	1	03	11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	163.200.000	234.300.000	-	14.300.000	42.900.000	291.500.000	178,62
			04	01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	
			04	02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	
			04	03	- Station Wagon	163.200.000	234.300.000	-	14.300.000	42.900.000	291.500.000	178,62

4	1	1	03	03		B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.310.000	64.135.000	1.450.000	1.700.000	2.660.000	69.945.000	2.113,14
					04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-	
					04 02	- Micro Bus	3.310.000	64.135.000	1.450.000	1.700.000	2.660.000	69.945.000	2.113,14
4	1	1	03	04		B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	922.200	27.103.200	-	12.335.300	11.460.000	50.898.500	5.519,25
					04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-	
					04 02	- Micro Bus	922.200	27.103.200	-	12.335.300	11.460.000	50.898.500	5.519,25
4	1	1	03	12		B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	-	-	-	-	-	
					04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-	
					04 02	- Micro Bus	-	-	-	-	-	-	
4	1	1	03	05		C-1 Truk, Pick Up (Tidak Umum)	2.001.201.000	1.741.133.300	239.642.000	193.347.500	114.007.500	2.288.130.300	114,34
					04 01	- Truk	252.728.000	193.829.500	25.005.000	33.590.000	4.257.500	256.482.000	101,49
					04 02	- Pick Up	1.748.475.000	1.547.503.800	214.637.000	159.757.500	109.750.000	2.031.648.300	116,20
4	1	1	03	06		C-2 Truk, Pick Up (Umum)	1.857.858.000	1.424.162.000	114.160.000	294.876.000	146.072.000	1.979.270.000	106,54
					04 01	- Truk	1.836.898.000	1.386.562.000	114.160.000	278.036.000	146.072.000	1.924.830.000	104,79
					04 02	- Pick Up	20.960.000	37.600.000	-	16.840.000	-	54.440.000	
4	1	1	03	13		C-3 Truk, Pick Up (Dinas)	39.700.000	65.600.000	-	-	24.100.000	89.700.000	225,94
					04 01	- Truk	-	25.900.000	-	-	24.100.000	50.000.000	
					04 02	- Pick Up	39.700.000	39.700.000	-	-	-	39.700.000	100,00
4	1	1	03	09	01	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	15.415.763.000	11.370.831.200	1.162.522.000	1.261.040.800	1.130.856.200	14.925.250.200	96,82
4	1	1	03	15	01	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	39.965.800	45.587.100	7.040.000	-	2.820.000	55.447.100	138,74
4	1	1	08			Pajak Air Permukaan	60.000.000	53.076.000	6.600.000	6.700.000	6.950.000	73.326.000	122,21
					01 04 01	Pajak Air Permukaan	60.000.000	53.076.000	6.600.000	6.700.000	6.950.000	73.326.000	122,21
4	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.675.000	16.429.000	280.000	1.280.000	1.294.000	19.283.000	123,02
					17	Pendapatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.700.000	13.454.000	-	1.000.000	1.000.000	15.454.000	121,69
					01	Sewa Tanah Dan Bangunan	4.000.000	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	4.000.000	100,00
					04 01	- Sewa Tempat Kantin	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	2.000.000	100,00
						- Sewa Tempat Foto Copy	2.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	2.000.000	100,00
4	1	4	17	03		Sewa Lahan	8.700.000	11.454.000	-	-	-	11.454.000	131,66

				04	01	-	Sewa Tempat Penitipan KBM	8.700.000	11.454.000	-	-	11.454.000	131,66
				4	1	4	Lain-lain	2.975.000	2.975.000	280.000	280.000	3.829.000	128,71
				4	1	4	Lain-lain	2.975.000	2.975.000	280.000	280.000	3.829.000	128,71
							- Pembuatan STNKB (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	2.975.000	2.975.000	280.000	280.000	3.829.000	128,71
							J U M L A H =	57.654.726.000	45.641.007.700	5.291.851.400	5.484.918.300	61.909.080.800	107,38

Kulon Progo, 02 Januari 2015

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN.WINARTA, SE.

NIP. 19690825 198801 1 001

NUGROHO.HARTUTIANTO, SIP

NIP. 19670901 198803 1 003

				4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	514.815.869,39	318.713.000,00	56.435.000	55.226.000	483.224.000	93,86
				4	3	1	Pendapatan Hibah					-	
				4	3	1	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	514.815.869,39	468.642.000,00	56.435.000	55.226.000	633.153.000	122,99
						01	Dealer Otomotif	260.083.731,07	270.338.000,00	31.865.000	29.680.000	359.233.000	138,12
						04	PT Jasa Raharja	254.732.138,32	198.304.000,00	24.570.000	25.546.000	273.920.000	107,63
							J U M L A H =	514.815.869,39	468.642.000,00	56.435.000,00	55.226.000,00	633.153.000	122,99

Kulon Progo, 02 Januari 2015

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN.WINARTA, SE.

NIP. 19690825 198801 1 001

NUGROHO.HARTUTIANTO, SIP

NIP. 19670901 198803 1 003

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2015
SAMPAI DENGAN BULAN : MARET 2015

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2015	REALISASI				%
			JANUARI Rp.	PEBRUARI Rp.	MARET Rp.	Triwulan I	
4	PENDAPATAN	62.594.332.000	5.481.389.300	5.477.819.000	5.875.946.400	16.835.154.700	26,90
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.594.332.000	5.481.389.300	5.477.819.000	5.875.946.400	16.835.154.700	26,90
4 1 1	Pajak Daerah	62.578.657.000	5.481.032.300	5.477.413.000	5.875.547.400	16.833.992.700	26,90
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	38.730.916.000	3.365.759.500	3.241.068.400	3.442.843.300	10.049.671.200	25,95
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	1.131.156.300	1.088.016.000	1.161.377.000	3.380.549.300	43,56
04 01	- Sedan	959.207.000	92.478.800	77.924.000	97.402.000	267.804.800	27,92
04 02	- Jeep	663.034.000	72.099.600	62.768.100	71.428.400	206.296.100	31,11
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	966.577.900	947.323.900	992.546.600	2.906.448.400	47,35
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	708.000	433.100	497.100	1.638.200	13,49
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	12.144.000	708.000	433.100	497.100	1.638.200	13,49
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	13.338.300	9.322.100	11.359.400	34.019.800	31,48
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	-	-	1.360.000	90,97
04 02	- Jeep	5.061.000	1.210.000	-	-	1.210.000	23,91
04 03	- Station Wagon	101.516.000	10.768.300	9.322.100	11.359.400	31.449.800	30,98
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	6.716.800	15.185.700	12.824.600	34.727.100	64,87
04 01	- Bus	-	-	8.393.200	-	8.393.200	-
04 02	- Micro Bus	53.537.000	6.716.800	6.792.500	12.824.600	26.333.900	49,19
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	2.767.400	2.002.600	3.461.500	8.231.500	19,98
04 01	- Bus	3.238.000	645.000	-	948.700	1.593.700	49,22

4	1	1	03	04		B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	949.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04	02	- Micro Bus	949.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	03	12		B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04	02	- Micro Bus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	03	05		C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	2.061.236.000	326.339.500	260.165.000	228.382.500	814.887.000	39.53						
				04	01	- Truck	260.307.000	137.962.500	117.282.500	133.277.500	388.522.500	149,26						
				04	02	- Pick Up	1.800.929.000	188.377.000	142.882.500	95.105.000	426.364.500	23,67						
4	1	1	03	06		C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.913.592.000	1.560.000	-	-	1.560.000	0,08						
				04	01	- Truck	1.892.004.000	1.560.000	-	-	1.560.000	0,08						
				04	02	- Pick Up	21.588.000	-	-	-	-	-						
4	1	1	03	13		C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	40.891.000	-	-	-	-	0,00						
				04	01	- Truck	-	-	-	-	-	-						
				04	02	- Pick Up	40.891.000	-	-	-	-	0,00						
4	1	1	03	09	04	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	11.235.819.000	1.089.079.000	1.129.196.400	1.409.480.800	3.607.756.200	32,11						
4	1	1	03	15	04	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	41.164.000	7.610.000	-	29.616.000	37.226.000	90,43						
4	1	1	08			Pajak Air Permukaan	66.000.000	7.600.000	7.400.000	7.400.000	22.400.000	33,94						
				01	04	Pajak Air Permukaan	66.000.000	7.600.000	7.400.000	7.400.000	22.400.000	33,94						
4	1	2				Retribusi Daerah	15.675.000	357.000	406.000	399.000	1.162.000	7,41						
4	1	2				Retribusi Jasa Usaha	12.700.000	-	-	-	-	0,00						
4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.000.000	-	-	-	-	0,00						
				04	01	- Kantin	2.000.000	-	-	-	-	0,00						
				04	02	- Tempat Foto Copy	2.000.000	-	-	-	-	0,00						
4	1	2	02	09		Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.700.000	-	-	-	-	0,00						
4	1	2	02	09	04	- Penitipan Kendaraan Bermotor	8.700.000	-	-	-	-	0,00						
4	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.975.000	357.000	406.000	399.000	1.162.000	39,06						

4	1	4	20		Lain-lain	2.975.000	357.000	406.000	399.000	1.162.000	39,06
4	1	4	20	08	- Pembuatan STNKB (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	2.975.000	357.000	406.000	399.000	1.162.000	39,06
										-	
										-	
					J U M L A H =	62.594.332.000	5.481.389.300	5.477.819.000	5.875.946.400	16.835.154.700	26,90

Kulon Progo, 01 April 2015

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE.
NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	514.815.869,39	50.062.000	49.560.000	53.062.000	152.684.000	29,66
4	3	1			Pendapatan Hibah						
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	514.815.869,39	50.062.000	49.560.000	53.062.000	152.684.000	29,66
				01	Dealer Otomotif	260.093.731,07	25.970.000	26.650.000	28.230.000	80.850.000	31,09
				04	PT Jasa Raharja	254.732.138,32	24.092.000	22.910.000	24.832.000	71.834.000	28,20
					J U M L A H =	514.815.869,39	50.062.000,00	49.560.000,00	53.062.000,00	152.684.000	29,66

Kulon Progo, 01 April 2015

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE.
NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2016
SAMPAI DENGAN BULAN : JUNI 2015

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2015	Triwulan I	REALISASI				%
				APRIL Rp.	MEI Rp.	JUNI Rp.	s/d JUNI	
4	PENDAPATAN	62.594.332.000	16.835.154.700	5.506.107.900	4.931.348.800	5.410.064.000	32.682.675.400	52,21
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.594.332.000	16.835.154.700	5.506.107.900	4.931.348.800	5.410.064.000	32.682.675.400	52,21
4 1 1	Pajak Daerah	62.578.657.000	16.833.992.700	5.505.736.900	4.931.054.800	5.409.763.000	32.680.547.400	52,22
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	38.730.916.000	10.049.671.200	3.188.158.200	3.173.189.100	3.484.316.400	19.895.334.900	51,37
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	3.380.549.300	1.102.833.500	1.012.147.500	1.246.419.500	6.741.949.800	86,88
04 01	- Sedan	959.207.000	267.804.800	97.167.600	107.570.400	116.015.200	588.555.000	61,36
04 02	- Jeep	663.034.000	206.296.100	107.705.300	56.451.300	63.486.000	432.937.700	65,30
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	2.908.448.400	897.960.600	849.125.800	1.066.919.300	5.720.454.100	93,20
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	1.638.200	2.124.700	540.000	1.004.000	5.306.900	43,70
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	12.144.000	1.638.200	2.124.700	540.000	1.004.000	5.306.900	43,70
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	34.019.800	7.839.200	14.246.100	16.773.100	72.878.200	67,43
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	90,97
04 02	- Jeep	5.061.000	1.210.000	-	352.000	766.500	2.328.500	46,01
04 03	- Station Wagon	101.516.000	31.449.800	7.839.200	13.894.100	16.006.600	69.189.700	68,16
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	34.727.100	6.178.800	11.039.700	5.189.800	57.135.400	106,72
04 01	- Bus	-	8.393.200	-	-	-	8.393.200	-
04 02	- Micro Bus	53.537.000	26.333.900	6.178.800	11.039.700	5.189.800	48.742.200	91,04

4	1	1	01	04		B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	8.231.500	6.849.000	5.899.000	6.992.300	27.971.800	67,88
			04	01		- Bus	3.238.000	1.593.700	974.100		2.224.500	4.792.300	148,00
			04	02		- Micro Bus	37.968.000	6.637.800	5.874.900	5.899.000	4.767.800	23.179.500	61,05
4	1	1	01	12		B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	3.220.000	4.338.800	-	-	1.665.000	6.003.800	186,45
			04	01		- Bus	-	2.063.800	-	-	-	2.063.800	
			04	02		- Micro Bus	3.220.000	2.275.000	-	-	1.665.000	3.940.000	122,36
4	1	1	01	05		C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	3.031.191.000	1.023.325.600	342.500.600	401.708.500	336.162.200	2.103.696.900	69,40
			04	01		- Truck	1.372.587.000	319.370.700	113.405.600	144.990.700	108.827.600	686.564.600	50,02
			04	02		- Pick Up	1.658.604.000	703.954.900	229.095.000	256.747.800	227.334.600	1.417.132.300	85,44
4	1	1	01	08		C-2 Truck, Pick Up (Umum)	455.934.000	254.518.400	78.415.500	78.789.600	51.013.600	462.737.100	101,49
			04	01		- Truck	454.267.000	251.221.600	77.271.500	78.789.600	50.228.800	457.511.500	100,71
			04	02		- Pick Up	1.667.000	3.296.800	1.144.000		784.800	5.225.600	313,47
4	1	1	01	13		C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	29.260.000	8.680.400	1.795.700	1.191.800	1.935.100	13.603.000	46,49
			04	01		- Truck	11.576.000	3.220.900		351.000		3.571.900	30,86
			04	02		- Pick Up	17.684.000	5.459.500	1.795.700	840.800	1.935.100	10.031.100	56,72
								71.300				71.300	
4	1	1	01	09	04	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	27.192.574.000	5.290.098.400	1.637.364.500	1.645.490.600	1.811.703.100	10.384.656.600	38,19
4	1	1	01	15	04	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	43.746.000	9.472.400	2.256.700	2.136.300	5.458.700	19.324.100	44,17
4	1	1	03			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.781.741.000	6.761.921.500	2.310.478.700	1.750.415.700	1.918.146.600	12.740.962.500	53,57
4	1	1	03	01		A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	8.316.584.000	2.292.109.800	828.967.000	531.653.000	1.054.147.800	4.706.877.600	56,60
			04	01		- Sedan	209.432.000	66.656.000	14.170.000	5.343.500	28.440.000	114.609.500	54,72
			04	02		- Jeep	366.827.000	13.247.500	151.245.000	4.080.000	45.366.000	213.928.500	58,32
			04	03		- Station Wagon	7.740.325.000	2.212.206.300	663.562.000	522.229.500	980.351.800	4.378.339.600	56,57
4	1	1	03	02		A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	-	-	-	-	
			04	01		- Sedan	-	-	-	-	-	-	
			04	02		- Jeep	-	-	-	-	-	-	
			04	03		- Station Wagon	-	-	-	-	-	-	
4	1	1	03	11		A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	168.096.000	-	-	-	106.900.000	106.900.000	63,59
			04	01		- Sedan	-	-	-	-	-	-	
			04	02		- Jeep	-	-	-	-	-	-	
			04	03		- Station Wagon	168.096.000	-	-	-	106.900.000	106.900.000	63,59

4	1	1	03	03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.410.000	8.382.500	212.500	-	-	8.595.000	
			04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-	
			04	02	- Micro Bus	3.410.000	8.382.500	212.500			8.595.000	
4	1	1	03	04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	949.000	-	9.037.500	-	-	14.165.000	
			04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-	
			04	02	- Micro Bus	949.000	-	9.037.500			14.165.000	
4	1	1	03	12	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	-	-	-	-	-	
			04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-	
			04	02	- Micro Bus	-	-	-	-	-	-	
4	1	1	03	05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	2.061.236.000	814.887.000	260.067.500	289.449.500	193.221.900	1.557.625.900	75,57
			04	01	- Truck	260.307.000	388.522.500	117.582.500	58.410.000	26.351.900	590.866.900	226,99
			04	02	- Pick Up	1.800.929.000	426.364.500	142.485.000	231.039.500	166.870.000	966.759.000	53,88
4	1	1	03	06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.913.592.000	1.560.000	33.920.000	23.256.000	-	58.736.000	3,07
			04	01	- Truck	1.892.004.000	1.560.000	33.920.000	23.256.000	-	58.736.000	3,10
			04	02	- Pick Up	21.588.000	-	-	-	-	-	-
4	1	1	03	13	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	40.891.000	-	-	-	375.000	375.000	0,92
			04	01	- Truck	-	-	-	-	-	-	-
			04	02	- Pick Up	40.891.000	-	-	-	375.000	375.000	0,92
4	1	1	03	09	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	11.235.819.000	3.607.756.200	1.176.506.200	906.057.200	547.854.400	6.238.174.000	55,52
4	1	1	03	15	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	41.164.000	37.226.000	1.788.000	-	10.520.000	49.514.000	120,28
4	1	1	06		Pajak Air Permukaan	66.000.000	22.400.000	7.100.000	7.450.000	7.300.000	44.250.000	67,05
			01	04	Pajak Air Permukaan	66.000.000	22.400.000	7.100.000	7.450.000	7.300.000	44.250.000	67,05
4	1	2			Retribusi Daerah	12.700.000	-	-	-	-	-	0,00
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	12.700.000	-	-	-	-	-	0,00
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.000.000	-	-	-	-	-	0,00
4	1	2	02	01	- Kantin	2.000.000	-	-	-	-	-	0,00
4	1	2	02	01	- Tempat Foto Copy	2.000.000	-	-	-	-	-	0,00
4	1	2	02	09	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.700.000	-	-	-	-	-	0,00

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2015
SAMPAI DENGAN BULAN : SEPTEMBER 2015

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

KODE REKENING		URAIAN	TARGET 2015	s/d Triwulan II	JULI Rp.	AGUSTUS Rp.	SEPTEMBER Rp.	s/d Triwulan III	%
4		PENDAPATAN	60.967.524.000	30.922.205.500	5.431.605.900	5.535.208.500	5.494.762.700	47.383.782.600	77,72
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.967.524.000	30.922.205.500	5.431.605.900	5.535.208.500	5.494.762.700	47.383.782.600	77,72
4	1	Pajak Daerah	60.951.849.000	30.911.709.500	5.431.220.900	5.505.078.500	5.494.524.700	47.342.533.600	77,67
4	1	Pajak Kendaraan Bermotor	32.467.692.000	17.334.206.500	3.100.537.300	3.233.334.800	3.223.211.700	26.891.290.300	82,82
4	1	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	5.414.807.700	1.006.203.600	927.119.700	988.201.000	8.336.332.000	107,43
	04	01 - Sedan	959.207.000	516.084.600	90.391.300	92.927.100	104.554.500	803.947.500	83,81
	04	02 - Jeep	663.034.000	384.645.700	52.849.800	68.869.700	52.860.900	569.256.100	85,86
	04	03 - Station Wagon	6.137.791.000	4.504.077.400	862.972.500	765.322.900	830.755.600	6.963.128.400	113,45
4	1	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	3.821.700	1.098.000	558.000	2.314.800	7.792.500	64,17
	04	01 - Sedan	-	-	-	-	-	-	-
	04	02 - Jeep	-	-	-	-	-	-	-
	04	03 - Station Wagon	12.144.000	3.821.700	1.098.000	558.000	2.314.800	7.792.500	64,17
4	1	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	61.170.000	6.335.400	3.450.000	11.554.300	82.509.700	76,35
	04	01 - Sedan	1.465.000	1.360.000	120.000	-	575.000	1.360.000	90,97
	04	02 - Jeep	5.061.000	2.467.000	6.215.400	3.450.000	10.979.300	3.162.000	62,48
	04	03 - Station Wagon	101.516.000	57.343.000	6.215.400	3.450.000	10.979.300	77.987.700	76,82
4	1	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	39.630.400	8.757.500	6.230.000	10.920.000	65.537.900	122,42
	04	01 - Bus	-	4.718.900	-	-	-	4.718.900	-
	04	02 - Micro Bus	53.537.000	34.911.500	8.757.500	6.230.000	10.920.000	60.819.000	113,60
4	1	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	31.807.200	1.711.700	2.625.000	4.325.500	40.469.400	98,21
	04	01 - Bus	3.238.000	11.678.700	-	221.000	2.627.600	14.527.300	448,66

4	1	1	01	12	04	02	- Micro Bus	37.968.000	20.128.500	1.711.700	2.404.000	1.697.900	25.942.100	68,33
							B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	3.220.000	4.078.800	1.665.000	745.000	1.440.000	7.928.800	246,24
					04	01	- Bus	-	1.625.000	-	-	-	1.625.000	
					04	02	- Micro Bus	3.220.000	2.453.800	1.665.000	745.000	1.440.000	6.303.800	186,77
4	1	1	01	05			C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	3.031.191.000	1.868.953.400	311.325.300	317.722.800	363.929.000	2.861.930.500	94,42
					04	01	- Truck	1.372.587.000	585.655.700	97.238.900	102.432.100	145.840.700	931.167.400	67,84
					04	02	- Pick Up	1.658.604.000	1.283.297.700	214.086.400	215.290.700	218.088.300	1.930.763.100	116,41
4	1	1	01	06			C-2 Truck, Pick Up (Umum)	455.934.000	410.737.200	61.455.900	76.846.700	32.188.400	581.228.200	127,48
					04	01	- Truck	454.287.000	404.409.800	61.455.900	76.131.700	32.097.400	574.094.800	126,38
					04	02	- Pick Up	1.667.000	6.327.400	-	715.000	91.000	7.133.400	427,92
4	1	1	01	13			C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	29.260.000	18.192.000	611.000	1.592.500	1.779.400	22.174.900	75,79
					04	01	- Truck	11.576.000	4.553.900	611.000	1.592.500	1.779.400	6.333.300	54,71
					04	02	- Pick Up	17.684.000	13.638.100	611.000	1.592.500	1.779.400	15.841.600	86,58
								-	61.800	-	-	-	61.800	
4	1	1	01	09	04	01	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	20.929.350.000	9.464.024.400	1.697.804.200	1.893.156.100	1.802.683.800	14.857.668.500	70,99
4	1	1	01	15	04	01	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	43.746.000	16.921.900	3.569.700	3.289.000	3.875.500	27.656.100	63,22
4	1	1	03				Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.424.157.000	13.537.653.000	2.323.933.600	2.264.893.700	2.264.413.000	20.390.893.300	71,74
4	1	1	03	01			A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	8.316.584.000	4.844.270.800	629.965.300	692.692.500	642.518.800	6.809.447.400	81,88
					04	01	- Sedan	209.432.000	144.082.500	6.723.000	7.463.500	17.030.000	175.299.000	83,70
					04	02	- Jeep	366.827.000	350.179.900	68.922.500	7.037.500	46.330.000	472.469.900	128,80
					04	03	- Station Wagon	7.740.325.000	4.350.008.400	554.319.800	678.191.500	579.158.800	6.161.678.500	79,60
4	1	1	03	02			A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	-	-	-	-	
					04	01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	
					04	02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	
					04	03	- Station Wagon	-	-	-	-	-	-	
4	1	1	03	11			A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	168.096.000	94.887.500	-	-	22.632.500	117.520.000	69,91
					04	01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	
					04	02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	
					04	03	- Station Wagon	168.096.000	94.887.500	-	-	22.632.500	117.520.000	69,91
4	1	1	03	03			B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.410.000	19.817.500	1.030.000	20.400.000	33.300.000	74.547.500	
					04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-	

4	1	1	03	04	04	02	- Micro Bus	3.410.000	19.817.500	1.030.000	20.400.000	33.300.000	74.547.500
4	1	1	03	04			B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	949.000	23.880.000	6.960.000	-	-	30.840.000
					04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-
					04	02	- Micro Bus	949.000	23.880.000	6.960.000	-	-	30.840.000
4	1	1	03	12			B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	63.800.000	33.300.000	-	-	99.100.000
					04	01	- Bus	-	32.500.000	-	-	-	32.500.000
					04	02	- Micro Bus	-	33.300.000	-	-	-	66.600.000
4	1	1	03	06			C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	2.061.236.000	1.238.664.500	247.156.500	293.827.000	264.519.000	2.044.167.000
					04	01	- Truck	260.307.000	192.220.000	92.235.000	102.685.000	90.150.000	477.290.000
					04	02	- Pick Up	1.800.929.000	1.046.444.500	154.921.500	191.142.000	174.368.000	1.566.877.000
4	1	1	03	08			C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.913.592.000	401.062.000	665.000	-	-	401.727.000
					04	01	- Truck	1.892.004.000	389.422.000	665.000	-	-	390.087.000
					04	02	- Pick Up	21.588.000	11.640.000	-	-	-	11.640.000
4	1	1	03	13			C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	40.891.000	32.187.500	9.400.000	-	-	41.587.500
					04	01	- Truck	-	18.800.000	-	-	-	18.800.000
					04	02	- Pick Up	40.891.000	13.387.500	9.400.000	-	-	22.787.500
								-	1.140.000	-	-	-	1.140.000
4	1	1	03	09	04	01	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	15.878.235.000	6.769.763.600	1.365.026.800	1.257.974.200	1.276.132.700	10.668.897.300
4	1	1	03	15	04	01	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	41.164.000	46.179.600	30.430.000	-	25.310.000	101.919.600
4	1	1	06				Pajak Air Permukaan	60.000.000	39.850.000	6.750.000	6.850.000	6.900.000	60.350.000
					01	04	Pajak Air Permukaan	60.000.000	39.850.000	6.750.000	6.850.000	6.900.000	60.350.000
4	1	4					Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.675.000	10.496.000	385.000	30.130.000	238.000	41.249.000
					17		Pendapatan Dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.700.000	8.550.000	-	29.780.000	-	38.330.000
					01		Sewa Tanah Dan Bangunan	4.000.000	2.200.000	-	17.180.000	-	19.380.000
					04	01	- Sewa Tempat Kamin	2.000.000	1.100.000	-	3.090.000	-	4.190.000
							- Sewa Tempat Foto Copy	2.000.000	1.100.000	-	3.090.000	-	4.190.000
							- Sewa Tempat ATM	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000
							- Sewa Tempat Display Kendaraan	-	-	-	8.000.000	-	8.000.000
4	1	4	17	03			Sewa Lahan	8.700.000	6.350.000	-	12.600.000	-	18.950.000
								-	-	-	-	-	217,82

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2015
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER 2015

Urusan Pemerintah : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

2

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2015 PRBHN	s/d Triwulan III	REALISASI			s/d Triwulan IV	%
				OKTOBER Rp.	NOVEMBER Rp.	DESEMBER Rp.		
4	PENDAPATAN	60.968.924.000	47.383.782.600	5.461.515.600	5.157.245.000	5.991.036.700	63.993.579.900	104,96
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.968.924.000	47.383.782.600	5.461.515.600	5.157.245.000	5.991.036.700	63.993.579.900	104,96
4 1 1	Pajak Daerah	60.951.849.000	47.342.533.600	5.446.032.600	5.156.965.000	5.990.685.700	63.936.196.900	104,90
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	34.467.692.000	26.891.290.300	3.344.406.600	3.214.016.900	3.439.513.300	36.889.227.100	107,03
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	8.336.332.000	997.785.800	966.885.600	1.092.954.100	11.393.957.500	146,83
04 01	- Sedan	959.207.000	803.947.500	97.046.600	109.672.400	114.010.800	1.124.677.300	117,25
04 02	- Jeep	663.034.000	568.256.100	60.886.400	56.781.400	68.197.000	758.120.900	114,34
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	6.963.128.400	639.852.800	797.431.800	910.746.300	9.511.159.300	154,96
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	7.792.500	1.985.100	693.700	177.000	10.648.300	87,68
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	12.144.000	7.792.500	1.985.100	693.700	177.000	10.648.300	87,68
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	82.509.700	4.466.400	10.476.500	19.738.500	117.191.100	108,44
04 01	- Sedan	1.465.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	90,97
04 02	- Jeep	5.061.000	3.162.000	-	-	145.000	3.307.000	65,34
04 03	- Station Wagon	101.515.000	77.987.700	4.466.400	10.476.500	19.593.500	112.524.100	110,84
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	65.537.900	8.981.400	5.950.800	14.211.800	94.681.900	176,85
04 01	- Bus	-	4.718.900	-	-	-	4.718.900	-
04 02	- Micro Bus	53.537.000	60.819.000	8.981.400	5.950.800	14.211.800	89.963.000	168,04

4	1	1	01	04		B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	40.469.400	2.829.700	4.257.300	5.055.200	52.611.600	127,68
			04	01		- Bus	3.239.000	14.527.300	289.600	945.000	2.410.300	18.172.200	561,22
			04	02		- Micro Bus	37.968.000	25.942.100	2.540.100	3.312.300	2.644.900	34.439.400	90,71
4	1	1	01	12		B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	3.220.000	7.928.800	-	-	1.205.200	9.134.000	283,66
			04	01		- Bus	-	1.625.000	-	-	1.067.700	2.692.700	
			04	02		- Micro Bus	3.220.000	6.303.800	-	-	137.500	6.441.300	200,04
4	1	1	01	05		C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	3.031.191.000	2.861.930.500	370.603.600	396.706.300	418.622.800	4.047.863.200	133,54
			04	01		- Truck	1.372.587.000	931.167.400	141.946.100	137.663.100	180.659.500	1.391.336.100	101,37
			04	02		- Pick Up	1.658.604.000	1.930.763.100	228.657.500	259.043.200	238.063.300	2.656.527.100	160,17
4	1	1	01	06		C-2 Truck, Pick Up (Umum)	455.934.000	581.228.200	59.550.100	67.137.600	55.145.900	763.061.800	167,36
			04	01		- Truck	454.267.000	574.044.800	57.396.400	67.137.600	53.228.400	751.856.200	165,51
			04	02		- Pick Up	1.667.000	7.133.400	2.154.700	-	1.917.500	11.205.600	672,20
4	1	1	01	13		C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	29.260.000	22.174.900	4.444.600	8.859.500	7.821.700	43.300.700	147,99
			04	01		- Truck	11.576.000	6.333.300	2.839.100	1.748.500	4.487.700	15.408.600	133,11
			04	02		- Pick Up	17.684.000	15.841.600	1.605.500	7.111.000	3.334.000	27.892.100	157,73
								61.800	-	-	-	61.800	
4	1	1	01	09	01	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	22.929.350.000	14.857.668.500	1.888.289.100	1.743.713.600	1.818.051.500	20.307.722.700	88,57
4	1	1	01	15	01	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	43.746.000	27.656.100	5.470.800	9.336.000	6.529.600	48.992.500	111,99
4	1	1	03			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.424.157.000	20.390.893.300	2.094.526.000	1.935.048.100	2.543.252.400	26.963.719.800	102,04
4	1	1	03	01		A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	8.316.584.000	6.809.447.400	600.900.100	462.733.800	656.192.100	8.529.273.400	102,56
			04	01		- Sedan	208.432.000	175.298.000	7.089.500	31.167.500	14.662.000	228.228.000	108,97
			04	02		- Jeep	366.827.000	472.489.900	47.067.500	42.282.500	5.810.000	567.629.900	154,74
			04	03		- Station Wagon	7.740.325.000	6.161.678.500	546.733.100	389.283.800	635.720.100	7.733.415.500	99,91
4	1	1	03	02		A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	-	-	-	-	
			04	01		- Sedan	-	-	-	-	-	-	
			04	02		- Jeep	-	-	-	-	-	-	
			04	03		- Station Wagon	-	-	-	-	-	-	
4	1	1	03	11		A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	168.096.000	117.520.000	-	1.050.000	148.800.000	267.370.000	159,06
			04	01		- Sedan	-	-	-	-	-	-	
			04	02		- Jeep	-	-	-	-	-	-	
			04	03		- Station Wagon	168.096.000	117.520.000	-	1.050.000	148.800.000	267.370.000	159,06
4	1	1	03	03		B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.410.000	74.547.500	-	1.210.000	53.700.000	129.457.500	3.796,41
			04	03		- Station Wagon	168.096.000	117.520.000	-	1.050.000	148.800.000	267.370.000	159,06
			04	03		- Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.410.000	74.547.500	-	1.210.000	53.700.000	129.457.500	3.796,41

	04.01	- Sewa Tempat Penitipan KEM	9.700.000	18.950.000	-	-	18.950.000	185,36
4.1.4.20		Lain-lain	2.975.000	2.919.000	483.000	280.000	371.000	136,24
4.1.4.20.01		Lain-lain	2.975.000	2.919.000	483.000	280.000	371.000	136,24
		- Pembuatan STNKB (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	2.975.000	2.919.000	483.000	280.000	371.000	136,24
		J U M L A H =	60.968.924.000	47.383.782.600	5.461.515.600	5.157.245.000	5.991.036.700	104,96

Kulon Progo, 02 Januari 2016

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE

NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP

NIP. 19670901 199803 1 003

4.3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	514.815.869,39	318.713.000,00	52.297.000	48.581.000	54.323.000	473.914.000	92,06
4.3.1		Pendapatan Hibah							
4.3.1.03		Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	514.815.869,39	458.225.000,00	52.297.000	48.581.000	54.323.000	613.426.000	119,15
	01	Dealer Otomotif	260.083.731,07	251.875.000	26.015.000	23.835.000	29.185.000	330.910.000	127,23
	04	PT Jasa Raharja	254.732.138,32	206.350.000	26.282.000	24.746.000	25.138.000	282.516.000	110,91
		J U M L A H =	514.815.869,39	458.225.000,00	52.297.000,00	48.581.000,00	54.323.000,00	613.426.000	119,15

Kulon Progo, 02 Januari 2016

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE

NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP

NIP. 19670901 199803 1 003

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2016
SAMPAI DENGAN BULAN : MARET 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

2

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2016	REALISASI				%
			JANUARI Rp.	PEBRUARI Rp.	MARET Rp.	Triwulan I	
4	PENDAPATAN	62.584.332.000	5.481.389.300	5.477.819.000	5.875.946.400	16.835.154.700	26,90
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.584.332.000	5.481.389.300	5.477.819.000	5.875.946.400	16.835.154.700	26,90
4 1 1	Pajak Daerah	62.578.657.000	5.310.208.500	5.303.931.400	5.692.118.600	16.306.258.500	26,06
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	38.730.916.000	3.204.718.000	3.078.248.400	3.274.419.600	9.557.386.000	24,68
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	1.084.895.200	1.041.906.200	1.114.555.400	3.241.456.800	41,77
04 01	- Sedan	959.207.000	87.563.400	73.766.900	94.857.600	256.187.900	26,71
04 02	- Jeep	663.034.000	65.588.500	61.410.100	68.247.600	193.256.200	28,15
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	931.733.300	906.729.200	953.550.200	2.792.012.700	45,49
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	708.000	342.000	402.000	1.452.000	11,96
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	12.144.000	708.000	342.000	402.000	1.452.000	11,96
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	12.848.500	8.990.000	10.210.200	32.048.700	29,65
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	-	-	1.360.000	90,97
04 02	- Jeep	5.061.000	1.210.000	-	-	1.210.000	23,91
04 03	- Station Wagon	101.516.000	10.278.500	8.990.000	10.210.200	29.478.700	29,04
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	5.811.000	11.635.900	12.522.600	29.969.500	55,98
04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-
04 02	- Micro Bus	53.537.000	5.811.000	11.635.900	12.522.600	29.969.500	55,98
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	2.574.000	2.002.600	3.109.200	7.685.800	18,65

4	1	4	07	01	Pendapatan Denda PKB	161.041.500	162.820.000	168.423.700	192.987.400	
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda BBNKB	9.782.300	10.861.800	15.005.100	17.048.600	
4	1	4	20		Lain-lain	2.975.000	406.000	399.000	1.162.000	39,06
4	1	4	20	08	- Pembuatan STNKB (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	2.975.000	406.000	399.000	1.162.000	39,06
					J U M L A H =	62.594.332.000	5.477.819.000	5.875.946.400	16.835.154.700	26,90

Kulon Progo, 01 April 2016

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE
NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	514.815.869,39	49.560.000	53.062.000	152.684.000	29,66
4	3	1			Pendapatan Hibah					
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	514.815.869,39	49.560.000	53.062.000	152.684.000	29,66
			01		Dealer Otomotif	260.083.731,07	26.650.000	26.230.000	80.850.000	31,09
			04		PT Jasa Raharja	254.732.138,32	22.910.000	24.832.000	71.834.000	28,20
					J U M L A H =	514.815.869,39	49.560.000,00	53.062.000,00	152.684.000	29,66

Kulon Progo, 01 April 2016

Mengetahui

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE
NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2016
SAMPAI DENGAN BULAN : JUNI 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

2

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2016	Triwulan I	REALISASI			%	
				APRIL Rp.	MEI Rp.	JUNI Rp.		s/d JUNI
4	PENDAPATAN	62.594.332.000	16.835.154.700	5.506.107.900	4.931.348.800	5.410.064.000	32.682.675.400	52,21
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.594.332.000	16.835.154.700	5.506.107.900	4.931.348.800	5.410.064.000	32.682.675.400	52,21
4 1 1	Pajak Daerah	62.578.657.000	16.306.258.500	5.321.766.000	4.733.010.700	5.199.747.000	31.560.782.200	50,43
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	38.730.916.000	9.557.386.000	3.021.792.900	2.984.267.700	3.291.349.000	18.654.795.600	48,68
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	7.760.032.000	3.241.456.800	1.054.682.600	966.785.100	1.189.582.300	6.452.506.800	83,15
04 01	- Sedan	959.207.000	256.187.900	90.337.100	98.716.000	109.040.100	554.281.100	57,79
04 02	- Jeep	663.034.000	193.256.200	101.990.500	49.289.100	59.182.500	403.718.300	60,89
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	2.792.012.700	862.355.000	618.780.000	1.021.359.700	5.494.507.400	89,52
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	1.452.000	1.782.000	540.000	863.100	4.637.100	38,18
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	12.144.000	1.452.000	1.782.000	540.000	863.100	4.637.100	38,18
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	32.048.700	7.665.000	13.342.600	16.297.700	69.354.000	64,17
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	90,97
04 02	- Jeep	5.061.000	1.210.000	-	352.000	766.500	2.328.500	46,01
04 03	- Station Wagon	101.516.000	29.478.700	7.665.000	12.990.600	15.531.200	65.665.500	64,68
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	29.969.500	6.178.800	10.195.500	5.189.800	51.533.600	96,26
04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-
04 02	- Micro Bus	53.537.000	29.969.500	6.178.800	10.195.500	5.189.800	51.533.600	96,26
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	7.685.800	6.399.000	5.572.200	6.156.600	25.753.600	62,50
04 01	- Bus	3.238.000	1.263.000	711.000	-	1.733.100	3.707.100	114,49
04 02	- Micro Bus	37.968.000	6.422.800	5.628.000	5.572.200	4.423.500	22.046.500	58,07

4	1	1	01	12	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	3.220.000	3.900.000	-	-	1.665.000	5.565.000	172,83
			04	01	- Bus	-	2.063.800				2.063.800	
			04	02	- Micro Bus	3.220.000	1.836.200			1.665.000	3.501.200	108,73
4	1	1	01	05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	3.031.191.000	978.339.400	321.190.300	367.351.200	317.144.000	1.384.024.900	65,45
			04	01	- Truck	1.372.587.000	306.567.900	106.688.800	131.171.100	102.027.200	648.455.000	47,24
			04	02	- Pick Up	1.658.604.000	669.771.500	214.501.500	236.180.100	215.116.800	1.335.569.900	80,52
4	1	1	01	06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	455.934.000	238.622.300	74.408.600	72.441.300	45.073.200	431.545.400	94,65
			04	01	- Truck	454.267.000	235.325.500	73.264.600	72.441.300	45.445.400	426.476.800	93,88
			04	02	- Pick Up	1.667.000	3.296.800	1.144.000		627.800	5.068.600	304,06
4	1	1	01	13	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	29.260.000	7.793.500	1.436.500	1.085.500	1.935.100	12.250.600	41,87
			04	01	- Truck	11.575.000	2.691.000		351.000		3.042.000	26,28
			04	02	- Pick Up	17.684.000	5.102.500	1.436.500	734.500	1.935.100	9.208.600	52,07
4	1	1	01	09	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	27.192.574.000	5.007.279.900	1.546.002.400	1.544.959.300	1.701.192.100	9.799.433.700	36,04
4	1	1	01	15	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	43.745.000	8.838.100	2.107.700	1.995.000	5.250.100	18.190.900	41,58
							6.726.472.500					
4	1	1	03		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.781.741.000	6.726.472.500	2.292.873.100	1.741.293.000	1.901.098.000	12.661.736.600	53,24
4	1	1	03	01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	8.316.584.000	2.273.895.000	819.040.000	526.596.000	1.042.660.000	4.662.191.000	56,06
			04	01	- Sedan	209.432.000	63.060.000	12.950.000	4.651.000	25.870.000	106.571.000	50,89
			04	02	- Jeep	356.827.000	12.530.000	150.990.000	4.050.000	41.960.000	209.530.000	57,12
			04	03	- Station Wagon	7.740.325.000	2.198.305.000	655.060.000	517.895.000	974.830.000	4.346.090.000	56,15
4	1	1	03	02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)							
			04	01	- Sedan							
			04	02	- Jeep							
			04	03	- Station Wagon							
4	1	1	03	11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	168.096.000				106.900.000	106.900.000	63,59
			04	01	- Sedan							
			04	02	- Jeep							
			04	03	- Station Wagon	168.096.000				106.900.000	106.900.000	63,59
4	1	1	03	03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.410.000	7.500.000	170.000			7.670.000	
			04	01	- Bus							
			04	02	- Micro Bus	3.410.000	7.500.000	170.000			7.670.000	
4	1	1	03	04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	949.000		7.230.000		5.050.000	12.280.000	
			04	01	- Bus							
			04	02	- Micro Bus	949.000		7.230.000		5.050.000	12.280.000	

REALISASI PEMERINTAHAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2016
SAMPAI DENGAN BULAN : SEPTEMBER 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

2

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2016	Triwulan II	REALISASI					%
				JULI Rp.	AGUSTUS Rp.	SEPTEMBER Rp.	s/d JULI		
4	PENDAPATAN	62.594.332.000	32.682.675.400	4.360.227.500	5.939.435.900	6.347.646.100	49.329.984.900	78,81	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.594.332.000	32.682.675.400	4.360.227.500	5.939.435.900	6.347.646.100	49.329.984.900	78,81	
4 1 1	Pajak Daerah	62.578.657.000	31.560.782.200	4.143.938.500	5.689.650.200	6.133.820.700	47.528.191.600	75,95	
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	38.730.916.000	18.854.795.600	2.881.971.500	3.516.235.200	3.435.809.700	28.688.812.000	74,07	
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (tidak umum)	7.760.032.000	6.452.506.800	983.982.700	1.176.086.700	1.128.967.200	9.741.543.400	125,53	
04 01	- Sedan	959.207.000	554.261.100	74.591.300	97.460.900	95.073.700	821.407.000	85,63	
04 02	- Jeep	663.034.000	403.718.300	75.761.300	104.643.300	56.947.400	641.070.300	96,69	
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	5.494.507.400	833.630.100	973.982.500	976.946.100	8.279.066.100	134,89	
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	4.637.100	724.500	1.750.100	2.598.800	9.710.500	79,96	
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-	
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-	
04 03	- Station Wagon	12.144.000	4.637.100	724.500	1.750.100	2.598.800	9.710.500	79,96	
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	69.354.000	10.663.100	14.764.700	6.864.800	101.686.600	94,09	
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	90,97	
04 02	- Jeep	5.061.000	2.328.500	120.800	-	577.500	3.026.800	59,81	
04 03	- Station Wagon	101.516.000	65.665.500	10.562.300	14.764.700	6.307.300	97.293.800	95,85	
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	51.533.600	8.331.300	12.683.000	13.585.700	86.133.600	160,89	
04 01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-	
04 02	- Micro Bus	53.537.000	51.533.600	8.331.300	12.683.000	13.585.700	86.133.600	160,89	
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	25.753.600	3.952.700	3.167.100	3.908.600	36.782.000	89,26	
04 01	- Bus	3.238.000	3.707.100	2.343.000	-	1.824.900	7.875.000	243,21	
04 02	- Micro Bus	37.968.000	22.046.500	1.609.700	3.167.100	2.083.700	28.907.000	76,14	

4	1	1	01	12	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	3.220.000	5.565.000	-	745.000	2.262.900	8.572.900	266,24
			04	01	- Bus	-	2.063.800				2.063.800	
			04	02	- Micro Bus	3.220.000	3.501.200		745.000	2.262.900	6.509.100	202,15
4	1	1	01	05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	3.031.191.000	1.984.024.900	317.658.600	314.282.500	357.261.800	2.973.227.800	96,09
			04	01	- Truck	1.372.587.000	648.455.000	122.526.900	103.788.900	145.255.700	1.020.026.500	74,31
			04	02	- Pick Up	1.658.604.000	1.335.569.900	195.131.700	210.493.600	212.006.100	1.953.201.300	117,76
4	1	1	01	06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	455.934.000	431.545.400	104.026.400	64.242.000	46.228.700	646.042.500	141,70
			04	01	- Truck	454.267.000	426.476.800	104.026.400	63.055.200	46.228.700	639.767.100	140,84
			04	02	- Pick Up	1.667.000	5.068.600		1.186.800		6.255.400	375,25
4	1	1	01	13	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	29.260.000	12.250.600	611.000	3.029.400	-	15.891.000	54,31
			04	01	- Truck	11.576.000	3.042.000		1.423.500		4.465.500	36,58
			04	02	- Pick Up	17.684.000	9.208.600	611.000	1.605.900		11.425.500	64,61
4	1	1	01	09	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	27.192.574.000	9.799.433.700	1.449.867.800	1.921.357.600	1.871.361.400	15.042.020.500	55,32
4	1	1	01	15	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	43.746.000	18.190.900	2.133.400	4.127.100	2.749.800	27.201.200	62,18
4	1	1	03		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.781.741.000	12.661.796.600	1.254.367.000	2.165.815.000	2.891.111.000	18.773.029.600	76,94
4	1	1	03	01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	8.316.584.000	4.662.191.000	512.630.000	936.038.000	948.530.000	7.059.389.000	84,88
			04	01	- Sedan	209.432.000	106.571.000	3.850.000	7.688.000	10.365.000	128.494.000	61,35
			04	02	- Jeep	366.827.000	209.530.000	36.670.000	95.580.000	97.110.000	438.890.000	119,64
4	1	1	03	02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	7.740.325.000	4.346.090.000	472.110.000	632.770.000	841.035.000	6.492.005.000	83,87
			04	01	- Sedan	-	-	-	260.000	-	260.000	
			04	02	- Jeep	-	-	-			-	
			04	03	- Station Wagon	-	-	-	260.000	-	260.000	
4	1	1	03	11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	168.096.000	106.500.000	87.000.000	174.000.000	-	367.900.000	218,86
			04	01	- Sedan	-	-	-			-	
			04	02	- Jeep	-	-	-			-	
			04	03	- Station Wagon	168.096.000	106.500.000	87.000.000	174.000.000	-	367.900.000	218,86
4	1	1	03	03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	3.410.000	7.670.000	-	-	39.800.000	47.470.000	
			04	01	- Bus	-	-	-			-	
			04	02	- Micro Bus	3.410.000	7.670.000	-	-	39.800.000	47.470.000	
4	1	1	03	04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	949.000	12.280.000	-	-	534.000	12.814.000	
			04	01	- Bus	-	-	-			-	
			04	02	- Micro Bus	949.000	12.280.000	-	-	534.000	12.814.000	
4	1	1	03	12	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	-	-	-	534.000	12.814.000	

4	1	4	20	08	-	Pembuatan STNKB (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	2.975.000	2.128.000	378.000	406.000	259.000	3.171.000	106,59
						J U M L A H =	62.594.332.000	32.682.675.400	4.360.227.500	5.939.435.900	6.347.646.100	49.329.984.900	78,81

Mengetahui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kulon Progo, 01 Agustus 2016
Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE.
NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	514.815.869,39	288.993.000,00	34.013.000	50.596.000	59.331.000	432.933.000	84,09
4	3	1			Pendapatan Hibah						-	
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	514.815.869,39	288.993.000,00	34.013.000	50.596.000	59.331.000	432.933.000	84,09
			01		Dealer Otomotif	260.083.731,07	147.895.000,00	12.975.000	23.280.000	33.135.000	217.285.000	83,54
			04		PT Jasa Raharja	254.732.138,32	141.098.000,00	21.038.000	27.316.000	26.196.000	215.648.000	84,66
					J U M L A H =	514.815.869,39	288.993.000,00	34.013.000,00	50.596.000,00	59.331.000,00	432.933.000	84,09

Mengetahui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kulon Progo, 01 Oktober 2016
Kasi Pembukuan Dan Penagihan

GUN WINARTA, SE.
NIP. 19590825 198801 1 001

NUGROHO HARTUTIANTO, SIP
NIP. 19670901 199803 1 003

REALISASI PENERIMAAN PAD DIY
TAHUN ANGGARAN 2016
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 1.20.05 DPPKA
(KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO)

2

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2016	TARGET 2016 PRBHN	Triwulan III	REALISASI				%
					OKTOBER Rp.	NOVEMBER Rp.	DESEMBER Rp.	s/d DESEMBER	
4	PENDAPATAN	62.594.332.000	71.898.697.276	49.329.984.900	7.041.389.600	9.092.709.500	8.607.507.100	74.071.591.100	103,02
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.594.332.000	71.898.697.276	49.329.984.900	7.041.389.600	9.092.709.500	8.607.507.100	74.071.591.100	103,02
4 1 1	Pajak Daerah	62.578.657.000	69.555.022.276	47.528.191.600	6.807.204.300	8.854.649.700	8.352.662.100	71.542.707.700	102,86
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	38.730.916.000	39.006.111.065	28.688.812.000	3.752.118.800	4.053.726.700	3.917.127.100	40.411.784.600	103,60
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Treat Umum)	7.760.032.000	12.359.040.500	9.741.543.400	1.184.250.800	1.479.087.600	1.405.590.700	13.810.472.700	111,74
04 01	- Sedan	959.207.000	1.156.446.700	821.407.000	115.142.300	120.959.600	132.769.800	1.190.297.900	102,93
04 02	- Jeep	663.034.000	792.936.000	641.070.300	70.210.800	90.901.300	113.957.500	916.139.900	115,54
04 03	- Station Wagon	6.137.791.000	10.409.657.800	8.279.066.100	996.897.700	1.267.226.700	1.158.844.400	11.704.034.900	112,43
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	12.144.000	11.184.600	9.710.500	3.116.400	510.300	176.400	13.513.600	120,82
04 01	- Sedan	-	-	-	-	-	-	-	-
04 02	- Jeep	-	-	-	-	-	-	-	-
04 03	- Station Wagon	12.144.000	11.184.600	9.710.500	3.116.400	510.300	176.400	13.513.600	120,82
4 1 1 01 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	108.072.000	117.423.500	101.686.600	5.261.400	16.998.200	17.102.900	141.048.500	120,12
04 01	- Sedan	1.495.000	1.360.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000	100,00
04 02	- Jeep	5.061.000	2.326.600	3.026.800	-	-	-	145.000	136,22
04 03	- Station Wagon	101.516.000	113.736.900	97.299.800	5.261.400	16.998.200	16.957.300	136.516.700	120,03
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	53.537.000	112.416.700	86.133.600	8.109.800	23.636.500	12.766.700	130.648.600	116,22
04 01	- Bus	-	8.393.200	-	-	-	-	-	0,00
04 02	- Micro Bus	53.537.000	104.023.500	86.133.600	8.109.800	23.636.500	12.766.700	130.648.600	125,59
4 1 1 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	41.206.000	43.953.900	36.782.000	4.905.500	7.563.400	9.425.000	58.675.900	133,49
04 01	- Bus	3.238.000	8.921.500	7.875.000	742.500	-	4.966.500	13.584.000	152,26

4	1	1	03	12	04	02	- Micro Bus	949.000	20.500.000	12.514.000	507.000	9.480.000	546.000	23.347.000	111,71
							B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	31.469.000	-	-	-	-	-	0,00
					04	01	- Bus	-	-	-	-	-	-	-	-
					04	02	- Micro Bus	-	31.469.000	-	-	-	-	-	0,00
4	1	1	03	05	04	01	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	2.061.236.000	3.280.766.000	2.143.258.000	485.220.000	639.800.000	467.380.000	3.739.658.000	113,99
					04	01	- Truck	260.307.000	1.323.359.000	770.652.000	305.260.000	346.590.000	186.040.000	1.610.532.000	121,70
					04	02	- Pick Up	1.800.929.000	1.957.407.000	1.372.606.000	183.960.000	293.220.000	279.340.000	2.129.126.000	108,77
4	1	1	03	06	04	01	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.913.592.000	65.480.000	65.886.000	-	-	5.780.000	91.666.000	139,99
					04	01	- Truck	1.892.004.000	65.480.000	65.886.000	-	-	5.780.000	91.666.000	139,99
					04	02	- Pick Up	21.588.000	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	03	13	04	01	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	40.891.000	61.992.000	300.000	-	1.020.000	4.070.000	5.390.000	8,69
					04	01	- Truck	-	53.109.000	-	-	-	4.070.000	4.070.000	7,66
					04	02	- Pick Up	40.891.000	8.883.000	300.000	-	1.020.000	-	1.320.000	14,86
4	1	1	03	09	04	01	E-1 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Tidak Umum)	11.235.819.000	14.553.010.211	9.000.424.600	1.622.552.000	1.816.312.000	1.378.175.000	14.417.463.600	99,07
4	1	1	03	15	04	01	E-3 Sepeda Motor (R. 2 / R.3, Dinas)	41.164.000	152.403.000	55.328.000	9.240.000	1.320.000	42.154.000	108.042.000	70,89
4	1	1	06				Pajak Air Permukaan	66.000.000	71.000.000	66.350.000	7.800.000	7.600.000	7.900.000	69.650.000	126,27
					01	04	Pajak Air Permukaan	66.000.000	71.000.000	66.350.000	7.800.000	7.600.000	7.900.000	69.650.000	126,27
4	1	2					Retribusi Daerah	12.700.000	12.700.000	29.480.000	-	-	-	29.480.000	232,13
							Retribusi Jasa Usaha	12.700.000	12.700.000	29.480.000	-	-	-	29.480.000	232,13
4	1	2	02	01			Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	4.000.000	4.000.000	14.360.000	-	-	-	14.360.000	359,00
					04	01	- Kantin	2.000.000	2.000.000	3.180.000	-	-	-	3.180.000	159,00
					04	02	- Tempat Foto Copy	2.000.000	2.000.000	3.180.000	-	-	-	3.180.000	159,00
							Display KBM	-	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-
4	1	2	02	09			Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.700.000	8.700.000	15.120.000	-	-	-	15.120.000	173,79
					04	01	- Penitipan Kendaraan Bermotor	8.700.000	8.700.000	15.120.000	-	-	-	15.120.000	173,79
4	1	4					Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	2.375.000	2.330.375.000	1.772.313.300	234.185.300	238.059.800	254.845.000	2.499.403.400	107,23
							Pendapatan Denda Pajak	-	2.328.000.000	1.769.142.300	233.898.300	237.709.800	254.530.000	2.495.280.400	-
							Pendapatan Denda PKB	-	2.328.000.000	1.657.374.500	220.369.000	223.236.200	211.926.000	2.313.506.100	-

